HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
28 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SELASA, 3 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

PDIP Pertanyakan Siapa yang Nyuruh Sigit Sadap Prabowo: Apakah Perintah Jokowi?

Oleh Redaksi · 3 Nov, 22.29 WIB

BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyampaikan reaksi menohok menyikapi penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam skandal penyadapan secara ilegal (illegal wiretapping) dan peretasan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Guntur mempertanyakan aktor intelektual maupun pihak pemberi perintah di balik aksi penyadapan rahasia yang menyasar saluran komunikasi Kepala Negara tersebut.

Melalui unggahan di akun X pribadinya yang dikutip pada Selasa (3/11/2026), Guntur menilai peristiwa penangkapan mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara ini sebagai catatan sejarah kelam ketatanegaraan.

"Siapa yang Menyuruh Listyo Sigit Menyadap Presiden Prabowo? Apa Jokowi?" tulis Guntur Romli dilansir dari X pribadinya, Selasa (3/11/2026).

"Malam ini sejarah mencatat: seorang mantan Kapolri, jenderal yg dipilih dan dilantik Jokowi, ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia," ucapnya.

Guntur menegaskan bahwa aksi peretasan dan penyadapan ilegal terhadap simbol negara merupakan pelanggaran hukum kelas berat yang berpotensi mengarah pada tindakan subversif.

"Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa. Itu kejahatan serious terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 20
EDUKASI 22
Aneka Berita 24

NASIONAL

Effendi Gazali Sebut Kasus Penyadapan Presiden sebagai Makar! 'Ini akan Terbaca untuk Apa'

BANDA ACEH - Pakar komunikasi Politik Effendi Gazali menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Dia bahkan menyebut kasus tersebut sebagai tindakan makar.

Pernyataan itu disampaikan Effendi setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Perluas Akses Layanan, BBPOM Aceh Jalin Kerja Sama Penyelenggaraan MPP Sabang

SABANG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperluas akses pelayanan publik agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang dan sejumlah …

Selengkapnya di halaman 20 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit dan Tersangka Penyadapan Presiden Didesak Dihukum Mati!

BANDA ACEH - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mantan Kapolri jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Apa Tujuannya dan Kepada Siapa Dilaporkan?

BANDA ACEH – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Penetapan ini diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

41 BERITA

NASIONAL

PDIP Pertanyakan Siapa yang Nyuruh Sigit Sadap Prabowo: Apakah Perintah Jokowi?

Oleh Redaksi · 3 Nov, 22.29 WIB

BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyampaikan reaksi menohok menyikapi penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam skandal penyadapan secara ilegal (illegal wiretapping) dan peretasan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Guntur mempertanyakan aktor intelektual maupun pihak pemberi perintah di balik aksi penyadapan rahasia yang menyasar saluran komunikasi Kepala Negara tersebut.

Melalui unggahan di akun X pribadinya yang dikutip pada Selasa (3/11/2026), Guntur menilai peristiwa penangkapan mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara ini sebagai catatan sejarah kelam ketatanegaraan.

"Siapa yang Menyuruh Listyo Sigit Menyadap Presiden Prabowo? Apa Jokowi?" tulis Guntur Romli dilansir dari X pribadinya, Selasa (3/11/2026).

"Malam ini sejarah mencatat: seorang mantan Kapolri, jenderal yg dipilih dan dilantik Jokowi, ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia," ucapnya.

Guntur menegaskan bahwa aksi peretasan dan penyadapan ilegal terhadap simbol negara merupakan pelanggaran hukum kelas berat yang berpotensi mengarah pada tindakan subversif.

"Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa. Itu kejahatan serious terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Dan bila terbukti dilakukan untuk menggerogoti kewibawaan kepala negara, itu makar dalam bentuk paling licik," ujarnya.

Ia lantas mengurai janggalnya motif pribadi seorang perwira tinggi dalam melakukan tindakan berisiko tinggi tanpa adanya sokongan atau perintah dari kekuatan tertentu.

"Lalu pertanyaan yang tak bisa dihindari: ini kejahatan pribadi, atau ada perintah? Jika pribadi, untuk apa jenderal di puncak karier menyadap presidennya sendiri? Jika ada perintah, siapa pemberinya?" tanyanya.

"Penyadapan diduga terjadi sepanjang 2025–2026. Pada periode itu, atasan formal Listyo Sigit adalah Presiden Prabowo, yg justru menjadi korban. Mustahil korban menyuruh dirinya sendiri disadap. Artinya, kalau ada perintah, perintah itu datang dari luar struktur resmi negara," ungkapnya.

Guntur secara terbuka juga menyenggol spekulasi keterlibatan lingkaran mantan presiden dalam pusaran kasus ini.

"Maka publik wajar bertanya: kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo Sigit? Kepada Presiden yg sah, atau kepada patron lamanya, Jokowi, presiden yg mengangkatnya menjadi Kapolri?"

"Bisik-bisik soal 'perintah Solo' sudah beredar luas. Polri harus menjawabnya dgn pembuktian, bukan membiarkannya jadi rumor liar," ucapnya.

Guntur menyatakan dukungan penuh kepada jajaran Bareskrim Polri untuk membongkar perkara tersebut secara transparan dan tuntas hingga ke akar-akarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolres Sukoharjo Dicopot dan Diperiksa Buntut Penggeledahan Ponpes

Oleh Redaksi · 2 Nov, 20.55 WIB

BANDA ACEH - Keempatnya yakni eks Kapolres Sukaharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, IPTU AS selaku eks Kasat Reserse, IPDA FA selaku eks Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku eks Kanit PPA.

"Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (2/11).

Trunoyudo menerangkan terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut.

Garis polisi terpasang di salah satu Ponpes di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (28/10/2026)

Pertama, proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah. Kedua, pendalaman dugaan pelanggaran etik oleh Propam Mabes Polri terhadap personel yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional," ucap dia.

Trunoyudo menyebut langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Polri turut menyampaikan penyesalan mendalam atas keluhan dan trauma yang dialami para santriwati serta pengasuh ponpes atas penggeledahan yang terjadi.

Trunoyudo mengatakan Polri telah mendengarkan berbagai keluhan dan kritik, termasuk secara langsung dari pihak-pihak yang terdampak. Ia menegaskan Polri menghormati pondok pesantren sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan akhlak dan keilmuan umat Muslim.

"Kamenyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan," ucap dia.

Sebelumnya, Mabes Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo buntut kasus penggeledahan di pondok pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Effendi Gazali Sebut Kasus Penyadapan Presiden sebagai Makar! 'Ini akan Terbaca untuk Apa'

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.57 WIB

BANDA ACEH - Pakar komunikasi Politik Effendi Gazali menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Dia bahkan menyebut kasus tersebut sebagai tindakan makar.

Pernyataan itu disampaikan Effendi setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo.

"Ini bukan hanya soal penyadapan. Saya mau mengatakan pada malam ini, ini soal makar," kata Effendi dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (3/11/2026) malam.

Effendi menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menunjukkan persoalan serius. Dia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak dari dalam negeri, bukan semata-mata ancaman dari luar negeri.

"Makar lah. Jadi ternyata yang selama ini dinyatakan oleh Pak Prabowo itu ada antek-antek asing, ternyata asingnya di dalam ini loh," ujarnya.

Menurut Effendi, dugaan penyadapan tersebut mengindikasikan pelakunya memiliki kemampuan profesional. Dia menilai situasi itu menjadi ironi karena ancaman yang sebelumnya dibayangkan berasal dari pihak asing justru diduga melibatkan orang dalam.

"Kalau bayangannya antek-antek asing ternyata di dalam, berarti penyadapnya profesional. Level mantap. Karena Presiden agak dalam tanda petik terkelabui. Karena membayangkan yang nyadap antek-antek asing," katanya.

Effendi juga menilai perkembangan kasus ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, isu tersebut berpotensi semakin ramai menjadi perbincangan publik.

"Kami sampaikan ini, dan sekarang sudah mulai terbukti ya. Mau dibantah seperti apa pun, maka dalam komunikasi politik, angin politik akan makin kencang, makin bergemuruh," tuturnya.

Dia kemudian menyinggung istilah dewan jenderal di lingkungan kepolisian yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Effendi melihat isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik mengenai kepentingan di balik kasus penyadapan.

"Ini akan terbaca ini sebetulnya untuk apa. Kebetulan saya sendiri sebagai orang yang belajar komunikasi memahami itu, operasi politik," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Sementara itu, satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Akhirnya Kapolres Sukoharjo Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes HQ

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.38 WIB

BANDA ACEH - Mabes Polri mengakui menerima berbagai kritik terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran (HQ) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut, Polri memeriksa dan menonaktifkan empat personel yang terlibat dalam penggeledahan tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kritik dan keluhan, terutama dari pihak yang terdampak langsung, menjadi perhatian Polri sejak awal.

"Sejak awal Polri telah mendengarkan, baik itu keluhan dan kritik, terutama langsung yang terdampak," ujar Trunoyudo di …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit dan Tersangka Penyadapan Presiden Didesak Dihukum Mati!

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.40 WIB

BANDA ACEH - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

"Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta Nasution), EH (Eko Hadi)," kata Asep.

Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Nomor Telepon Prabowo hingga Tokoh Politik Diduga Disadap

Asep mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat dan tokoh penting di Indonesia.

Sasaran penyadapan tersebut, menurut Asep, mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut turut mendapat perhatian mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Melalui akun Instagram miliknya, Ferdinand menyampaikan pandangan keras mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Ferdinand menilai penyadapan tersebut merupakan bagian dari makar dan kejahatan serius terhadap negara.

Ia bahkan mendesak agar para pelaku dijatuhi hukuman mati.

"Pidanakan dengan hukuman mati," tulis Ferdinand dalam unggahannya.

Pernyataan Ferdinand tersebut merupakan opini pribadi.

Adapun penentuan jenis dan berat hukuman terhadap para tersangka tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ancaman Hukuman Penyadapan Ilegal di Indonesia

Penyadapan ilegal di Indonesia dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, bergantung pada bentuk perbuatan dan sarana yang digunakan.

Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 31 juncto Pasal 47 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketentuan ini mengatur larangan intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi elektronik maupun transmisi informasi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mantan Kapolri jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Apa Tujuannya dan Kepada Siapa Dilaporkan?

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.49 WIB

BANDA ACEH – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penetapan ini diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam.

Selain Listyo (inisial LSP), dua tersangka lain adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN, Kadivkum Polri) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Satu orang berinisial SU (Slamet Uliandi) masih berstatus saksi dan dalam pemeriksaan.

Target dan Cara Penyadapan

Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping) terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh Politik, media/jurnalis, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha. Aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Menurut keterangan resmi, penyadapan dilakukan dengan memasukkan nomor target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dasar proses penegakan hukum (penyelidikan atau penyidikan). Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan file dan jejak log pada Oktober 2026 untuk menutupi aktivitas tersebut. Tindakan ini melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Untuk Apa Penyadapan Dilakukan?

Hingga saat ini, motif atau tujuan spesifik penyadapan belum diungkapkan secara rinci oleh pihak Polri. Yang ditegaskan adalah bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukumyang sah dan dilakukan di luar prosedur resmi. Beberapa pengamat sebelumnya mendesak Polri menjelaskan motifnya karena kasus ini menyangkut kerahasiaan pejabat negara.

Kepada Siapa Dilaporkan?

Kasus ini bermula dari laporan internal. Seorang petugas Polri yang mengetahui adanya perintah penyadapan dan penghapusan data di luar prosedur kedinasan membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim dengan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan penyitaan barang bukti.

Tidak ada informasi resmi bahwa hasil penyadapan dilaporkan oleh para tersangka kepada pihak tertentu di luar. Justru mereka diduga berusaha menghilangkan jejak digitalnya.

Barang Bukti dan Proses

Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli. Barang bukti yang disita antara lain 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.

Kasus ini juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara dan penguatan alat bukti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Imbas Putusan MK dan MA

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.31 WIB

BANDA ACEH -Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Sultoni mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengambil langkah tegas dalam memproses pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini berdasarkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen persyaratan pendidikan saat mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Sultoni, putusan kedua lembaga Yudikatif tersebut harus menjadi perhatian serius DPR RI sebab menyangkut persoalan pemenuhan persyaratan calon wakil presiden, integritas penyelenggaraan pemilu, sampai dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

"DPR RI harus berani mengambil langkah tegas. Persoalan ini bukan sekadar polemik ijazah pribadi, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi, persyaratan pencalonan, dan integritas demokrasi. Kami mendesak DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusut persoalan ini hingga tuntas, termasuk memproses pemakzulan apabila ditemukan dasar hukum dan terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata Sultoni kepada wartawan di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Lebih dalam, Sultoni juga menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dimana, dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, sebab tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang membuktikan telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Tentunya, persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan begitu, Sultoni yakin dukungan masyarakat terhadap langkah DPR akan menguat apabila proses pemakzulan terjadi.

"Jangan pernah meragukan dukungan rakyat. Selama DPR bekerja berdasarkan fakta, tidak mengada-ada, dan menjalankan seluruh tahapan sesuai konstitusi serta aturan hukum yang berlaku, kami meyakini masyarakat akan memberikan dukungan penuh," pungkasnya

NASIONAL

Gibranisti: Jika Pun Ada Kesalahan, Itu pada Kemendikdasmen, Bukan Mas Wapres

Oleh Redaksi · 2 Nov, 20.13 WIB

BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut mendapat tanggapan dari Dewan Pembina Gibranisti, Ade Darmawan.

Ia menilai persoalan administrasi yang muncul dalam penerbitan dokumen tersebut tidak bisa secara otomatis dibebankan kepada Gibran.

Ade berpandangan, perlu ada pemisahan antara tanggung jawab pemohon dokumen dan instansi yang berwenang menerbitkannya.

Menurutnya, jika ditemukan kekeliruan administrasi dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan, maka …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pihak Gibran Sekarang Mulai Menuduh-nuduh Prabowo Juga Tak Punya Ijazah SMA

Oleh Redaksi · 2 Nov, 20.08 WIB

BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyasar Gibran, tetapi juga Presiden Prabowo Subianto.

Freddy beranggapan, apabila Gibran berhasil dimakzulkan, maka target selanjutnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan latar belakang pendidikan Prabowo yang juga ditempuh di luar negeri.

"Justru kami melihat ini sasaran utamanya, memang targetnya adalah Presiden Prabowo. Jadi tumbangkan dulu Wapres Gibran, kemudian sasaran berikutnya adalah menumbangkan Presiden Prabowo," kata Freddy.

Lebih lanjut, Freddy mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran dengan alasan persoalan Surat Keterangan (Suket) …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Dikenakan Pasal Berlapis, Terancam 10 Tahun Penjara

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.11 WIB

BANDA ACEH - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang, yakni Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen (Pol) Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen (Pol) Eko Hadi (EH) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk presiden RI, pejabat negara, politikus, tokoh media, organisasi kemasyarakatan, hingga pengusaha.

Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat ketiga tersangka dengan tiga pasal.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi secara melawan hukum, mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat transimisi elektronik yang tidak bersifat publik dengan ancaman pidana 10 tahun.

"Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perbuatan mengakses komputer atau perangkat elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun," ujar Kabareskrim Polri Irjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers, Selasa (3/11/2026).

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik tanpa hak dengan ancaman pidana hukuman penjara selama 8 tahun.

"Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP)," kata Asep.

Penyadapan itu juga diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penyidik mendalami dugaan penghapusan jejak aktivitas tersebut.

Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi. Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Proses penyidikan dilakukan menggunakan metode scientific crime investigation atau penyidikan berbasis pendekatan ilmiah.

Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik masih memeriksa satu orang lainnya dalam kapasitas sebagai saksi.

Penyidik menegaskan penanganan perkara masih berlanjut dan akan dilakukan secara profesional, transparan, serta akuntabel.

"Ini baru awal, kita telah tetapkan tiga tersangka dan satu masih dalam proses pemeriksaan saksi. Ini menunjukkan kami dan jajaran penyidik akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan profesional, transparan, dan akuntabel," tambah Asep.

NASIONAL

Usai Malaysia-Singapura, Nusron Wahid Dikabarkan Siapkan Perjalanan ke Jepang: MAKI Curiga Skenario Hindari KPK

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.55 WIB

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan.

Setelah sebelumnya melakukan perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura yang bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Nusron dikabarkan tengah mempersiapkan perjalanan ke Jepang.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga rencana perjalanan tersebut berpotensi menjadi siasat untuk kembali menghindari pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Boyamin mengaku memperoleh informasi mengenai pengajuan anggaran perjalanan dinas Nusron ke Jepang.

Informasi itu, menurutnya, menjadi dasar kecurigaan bahwa perjalanan luar negeri kembali dipersiapkan sebagai alasan untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Bahwa Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang, dari mana ini didapat? Karena Minggu kemarin sedang diajukan anggaran untuk dinas Nusron Wahid ke Jepang," kata Boyamin kepada Monitorindonesia.com, Senin (2/11/2026).

Boyamin menilai, rencana tersebut patut dicurigai karena Nusron sebelumnya juga tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan perjalanan dinas ke luar negeri.

Ia menduga, perjalanan ke Jepang dapat menjadi opsi yang disiapkan apabila sewaktu-waktu penyidik kembali memanggil Nusron untuk diperiksa sebagai saksi.

"Saya menduga, bepergian ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu dipanggil KPK," ujarnya.

Boyamin mengaku belum mengetahui kapan perjalanan dinas ke Jepang itu akan dilaksanakan.

Namun, ia menduga agenda tersebut berpotensi disesuaikan dengan jadwal pemanggilan penyidik.

"Jadi sewaktu-waktu mempersiapkan diri yang belum ditentukan waktunya, nanti kemudian akan dipaskan kalau nanti ada panggilan," paparnya.

Sorotan terhadap Nusron bukan tanpa alasan. Menteri ATR/BPN tersebut tercatat telah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK dalam perkara yang menyeret sejumlah anak buahnya.

Pada pemanggilan pertama, Nusron beralasan memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN.

Sementara pada pemanggilan kedua, ia berdalih sedang menjalankan agenda perjalanan dinas ke luar negeri.

Perjalanan Nusron ke Malaysia dan Singapura pada pertengahan Oktober 2026 pun menjadi perhatian. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Nusron berangkat dari Jakarta menuju Batam, Kepulauan Riau, sebelum menyeberang ke Singapura menggunakan kapal feri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa yang Disadap? Sumber Sebut Prabowo dan Teddy, Sejumlah Jenderal Diamankan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 19.20 WIB

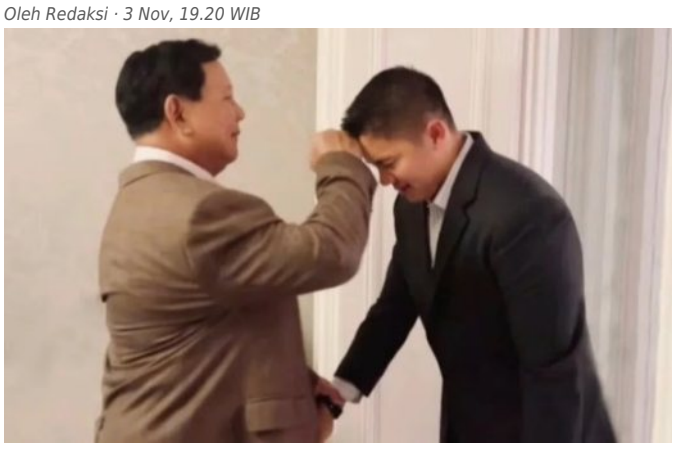

Momen penuh keakraban dan rasa hormat antara Teddy Indra Wijaya dan Prabowo Subianto.

BANDA ACEH – Beredar isu kuat di lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan aktivitas penyadapan terhadap pejabat tinggi negara.

Salah satu target yang disebut adalah Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Isu ini dikaitkan dengan penangkapan atau pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Menurut laporan sejumlah media yang mengutip sumber internal, operasi pengamanan dilakukan pada dini hari Selasa (3/11/2026).

Aktivitas penyadapan diduga dilakukan secara terkoordinasi dari sebuah rumah di Kompleks Widya Chandra, kawasan yang dikenal sebagai tempat tinggal pejabat tinggi negara.

Nama-nama yang disebut terlibat

Beberapa perwira yang disebut dalam berbagai laporan dan beredarnya tangkapan layar grup WhatsApp internal Polri antara lain:

- Irjen Pol. Ahrie Sonta (Kadivkum Mabes Polri) — dikabarkan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ia disebut sempat mengaku bertindak atas perintah atasan.
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri) — juga dikabarkan ditahan.
- Kombes Pol. Ferly Hediyat/Ferli Hidayat (Koorspripim Polri) — disebut ikut diamankan.
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri, kini anggota Wantimpres) — dikabarkan diamankan untuk diperiksa (BAP), namun kemudian dilepas. Beberapa sumber menyebut ia sebagai sosok yang memberi perintah.
- Irjen Pipit Rismanto (Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Politik dan Keamanan) — disebut masih menjalani pemeriksaan.

Beberapa sumber menyebut sejumlah perwira tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, meski Mabes Polri belum memberikan konfirmasi resmi.

Tanggapan pejabat

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa informasi yang beredar masih sebatas rumor di media sosial.

Ia mengaku belum menerima konfirmasi resmi dari instansi terkait maupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu," ujar Yusril.

Ia meminta publik bersabar menunggu penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Mabes Polri akan memberikan penjelasan terkait dinamika yang berkembang.

"Berkaitan sama konteks, dinamika yang nanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, dalam sore menjelang malam nanti, nanti kami dari Divhumas akan melaksanakan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Babak Baru Polemik Ijazah Gibran: PDIP Sebut Ada Penyalahgunaan Kekuasaan, Relawan Singgung Peran Masa Lalu

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.50 WIB

BANDA ACEH - Polemik mengenai keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memanas di ranah publik dan Politik nasional.

Keputusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah memicu perdebatan tajam antara pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kubu relawan pendukung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dari Solo hingga Istana, Begini Awal Kedekatan Jokowi dan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.32 WIB

BANDA ACEH — Hubungan profesional Joko Widodo (Jokowi) dan Listyo Sigit Prabowo mulai terjalin ketika keduanya sama-sama bertugas di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 2011. Saat itu, Jokowi menjabat Wali Kota Solo, sementara Listyo dipercaya memimpin Polresta Surakarta.

Pertemuan dalam lingkup pemerintahan daerah tersebut menjadi awal perjalanan panjang hubungan keduanya. Jokowi bertanggung jawab memimpin pemerintahan kota, sedangkan Listyo menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah yang sama.

Salah satu peristiwa besar yang terjadi selama Listyo menjabat Kapolresta Surakarta adalah aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton pada September 2011. Ledakan tersebut menewaskan pelaku dan menyebabkan sejumlah orang terluka.

Peristiwa itu menjadi bagian dari situasi keamanan yang dihadapi Surakarta pada masa kepemimpinan Jokowi sebagai wali kota dan Listyo sebagai kepala kepolisian setempat.

Sebelum menduduki jabatan Kapolresta Surakarta, Listyo telah meniti karier di lingkungan Polri melalui sejumlah penugasan di Jawa Tengah. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut pernah menjabat Kapolres Pati dan Kapolres Sukoharjo.

Pada 2011, ia mendapat promosi menjadi Kapolresta Surakarta. Penugasan tersebut menempatkannya dalam koordinasi pemerintahan daerah yang dipimpin Jokowi bersama Wakil Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo.

Hubungan profesional keduanya berlanjut setelah Jokowi meninggalkan Balai Kota Solo dan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.

Pada 30 Oktober 2014, Listyo yang saat itu berpangkat Komisaris Besar Polisi ditunjuk menjadi ajudan Presiden Jokowi. Penugasan tersebut membawanya dari lingkungan kepolisian daerah ke Istana Kepresidenan.

Sebagai ajudan, Listyo bertugas mendampingi Presiden dalam berbagai kegiatan resmi serta menjalankan tanggung jawab pengamanan dan koordinasi. Posisi itu menjadi pengalaman baru dalam perjalanan kariernya, sekaligus kembali mempertemukannya dengan Jokowi dalam lingkup tugas kenegaraan.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai ajudan, Listyo kembali menempati sejumlah jabatan strategis di kepolisian. Ia pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kapolda Banten, hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Kariernya kemudian mencapai salah satu posisi penting ketika dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada 6 Desember 2019.

Jabatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum Jokowi mengajukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis 98 Dapat Info Pihak Gibran Tak Mau Mundur, tapi Pilih Opsi Dimakzulkan, 'Berarti di Masyarakat'

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.06 WIB

BANDA ACEH - Aktivis demokrasi Ray Rangkuti mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.

Ray menilai polemik mengenai ijazah Gibran perlu diakhiri dan mendorong DPR segera mengambil langkah Politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pernyataan tersebut disampaikan Ray dalam konferensi pers bersama Aliansi Masyarakat Sipil yang membahas persoalan ijazah Gibran.

Menurut Ray, setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia rujuk, terdapat dua pilihan bagi Gibran.

"Kesimpulannya cuma dua. Mundur atau dimundurkan," kata Ray.

Pentolan aktivis 98 itu mengaitkan desakannya dengan putusan MA yang menurutnya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta putusan MK yang putusannya berbunyi ijazah SMA Gibran tidak ada.

Ray berpendapat kedua putusan tersebut telah mengakhiri ruang perdebatan mengenai keberadaan ijazah Gibran. Namun, penilaian mengenai makna dan konsekuensi hukum putusan tersebut merupakan pandangan Ray dalam konferensi pers.

"Sudah tidak ada lagi diskusi-diskusi lagi. Nah, melihat gelagat akhir-akhir ini, kami menangkap pihak Gibran terlihat tak akan mundur," ujarnya.

Ray mengaku menangkap kesan bahwa pihak Gibran tidak akan mengambil pilihan mengundurkan diri. Ia juga menyinggung pernyataan relawan Gibran Fredi Damanik yang disebutnya menyampaikan bahwa pihak Gibran lebih memilih menghadapi pemakzulan daripada mundur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ray berdasarkan informasi dan interpretasi yang ia peroleh dari sejumlah diskusi serta pemberitaan media.

Menurut Ray, apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, maka pemberhentian melalui mekanisme politik menjadi pilihan yang perlu didorong.

"Tinggal satu pilihan, Gibran itu memang maunya dimundurkan. Kekuatan itu ada dua bidang, di DPR dan publik secara menyeluruh, masyarakat," kata Ray.

Ray meminta partai-partai politik di DPR segera mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah menuju proses pemakzulan Gibran.

Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya pihak yang mendorong DPR mengambil Hak Angket karena beralasan masih memiliki ruang untuk menguji persoalan keberadaan ijazah Gibran.

Namun, Ray menilai putusan MA dan MK yang ia rujuk telah mengubah situasi sehingga DPR perlu melanjutkan proses melalui HMP.

"Bila sebelumnya angket, karena masih terbuka ruang untuk menguji terkait ijazah Gibran, ada atau tidak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Terancam Dimakzulkan, 98 Juta Pengikut Jokowi Ancam Duduki dan Tutup Jakarta

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.31 WIB

Ilustrasi Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy dan pendukung lainnya. FOTO/AI.

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu reaksi keras dari kelompok pendukungnya.

Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki dan menutup Jakarta apabila upaya pemakzulan terhadap Gibran terus didorong.

Fritz menyebut para pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran selama ini memilih diam.

Namun, dia mengingatkan agar pihak-pihak yang mendorong pemakzulan tidak menganggap sikap tersebut sebagai tanda bahwa para pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan.

"Singa lagi tidur. 98 juta pengikut Pak Jokowi dan Gibran lagi tidur. Jangan bangunkan. Jangan sampai kita tutup Jakarta," kata Fritz dalam pernyataannya, Selasa (3/11/2026).

Dia bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk turun ke Jakarta dan membuat ibu kota mengalami kemacetan total sebagai bentuk protes terhadap pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran.

"Kalau sampai kita turun demo, maka saya minta Jansen Sitindaon bertanggung jawab. Saya minta Denny Indrayana dan Eks HTI Khozinudin bertanggung jawab," ujarnya.

Fritz secara khusus menantang Jansen Sitindaon untuk berdebat secara langsung mengenai persoalan hukum maupun kebijakan terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Saya tantang kamu. Di mana kamu, undang saya. Kita Debat secara langsung. Debat hukum atau debat kebijakan atau debat tentang Wapres Gibran," katanya.

Dia juga memperingatkan agar tidak ada lagi ancaman pemakzulan terhadap Gibran dengan membawa-bawa nama DPR maupun MPR.

Menurut Fritz, Pasukan Gibran Indonesia bersama masyarakat yang selama ini mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan tinggal diam apabila wacana tersebut terus disuarakan.

"Jangan Anda ancam Wapres Gibran dimundurkan. Ancam dengan membawa nama DPR, ancam dengan membawa nama MPR. Kami ini masyarakat yang sementara ini mengawal Prabowo-Gibran. Jangan Anda tes kami," tegasnya.

Bahkan, Fritz mengancam akan mengerahkan massa untuk mengepung kantor pihak yang kembali menyuarakan pemakzulan Gibran.

"Kalau sekali lagi Anda ancam, saya akan turunkan pasukan untuk kepung kantor Anda," ujarnya.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan munculnya respons dari kelompok pendukung Gibran terhadap dinamika Politik dan perdebatan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden.

Di sisi lain, wacana pemakzulan merupakan persoalan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme tersendiri.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Politikus PSI: Negara yang Masih Ributkan Ijazah Adalah Negara Terbelakang

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.01 WIB

BANDA ACEH - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memantik komentar, termasuk dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka.

Kali ini, ia menanggapi pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengenai persyaratan ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden yang menurut Jimly hanya berlaku di sejumlah negara, dan beberapa di antaranya bukan negara maju.

Dedy menilai persoalan persyaratan ijazah yang terus diperdebatkan memang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa. Ia bahkan menganggap negara yang masih sibuk mempermasalahkan selembar ijazah sebagai negara yang tertinggal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Buka Suara soal Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal Polri terkait Isu Penyadapan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.34 WIB

Yusril Ihza Mahendra tampil rapi dan berwibawa di sebuah gedung pertemuan.

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar penangkapan sejumlah jenderal Polri yang beredar di media sosial. Kabar tersebut dikaitkan dengan isu penyadapan.

Yusril mengaku belum mengetahui kebenaran informasi yang ramai dibicarakan tersebut. Dia menegaskan belum menerima konfirmasi resmi mengenai kabar pengamanan sejumlah jenderal polisi dan meminta masyarakat menunggu penjelasan dari pihak yang berwenang.

"Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu," kata Yusril kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dia meminta masyarakat bersabar menunggu keterangan dari pejabat pemerintah yang berkompeten mengenai kabar tersebut.

"Mohon bersabar, barangkali nanti ada pihak yang berkompeten di kalangan pemerintah untuk menjawab dan menjelaskan persoalan ini," ujarnya.

Yusril juga mengaku belum mengetahui kebenaran kabar yang mengaitkan isu penyadapan tersebut dengan percakapan antara Presiden dan Kapolri. Dia kembali menegaskan masih menunggu penjelasan resmi dari pejabat yang memiliki otoritas.

"Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Jadi nanti kita akan tunggu saja. Barangkali nanti akan ada penjelasan resmi soal itu dari pejabat yang memang punya otoritas untuk menjelaskannya," tuturnya.

Dia mengatakan, informasi yang diterimanya sejauh ini tidak berbeda dengan kabar yang beredar di masyarakat. Yusril mengaku hanya mengetahui isu tersebut dari media sosial.

"Saya pun sama seperti Anda, mendengar kabar itu, membaca juga di media sosial. Belum dapat memastikan apa-apa tentang apa yang sebetulnya terjadi," katanya.

Saat ditanya apakah sudah ada penjelasan dari Mabes Polri mengenai pihak-pihak yang dikabarkan diamankan, Yusril kembali mengatakan belum mengetahuinya.

"Belum, belum. Entahlah kalau sudah ada sekarang. Karena saya ada di dalam 21 jam, tidak ikuti perkembangan," ucapnya.

Yusril juga memastikan belum ada komunikasi dari Presiden kepada Kementerian Koordinator Kumham Imipas untuk mendalami isu tersebut.

"Belum, sama sekali," katanya.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri yang dikaitkan dengan isu penyadapan percakapan Presiden dan Kapolri. Bahkan, salah satu sosok yang dikabarkan diamankan disebut-sebut merupakan jenderal polisi berbintang empat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penggerebekan Kampung Bahari: 1.816 Personel Diterjunkan, 27 Orang Ditangkap, hingga Ratusan Gram Sabu Disita

Oleh Van · 2 Nov, 15.45 WIB

JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar penggerebekan besar-besaran di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 1 November 2026.

Operasi gabungan tersebut menyasar lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.

Penggerebekan Kampung Bahari melibatkan sekitar 1.816 personel gabungan dari BNN, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Brimob, dan Polres Metro Jakarta Utara.

“Kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi. Oleh karena itu kita lakukan serempak, kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak, dari BNN, Bareskrim, Polda Metro Jaya, Brimob, dan lain sebagainya,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan pada Minggu, 1 November 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, setidaknya ada 27 orang yang ditangkap dan diduga terlibat dalam kasus narkoba.

Selain menangkap 27 orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan dan pendalaman perkara oleh penyidik.

“Dari lokasi itu berhasil kita amankan sabu, ya. Sabu itu ratusan gram, kemudian ada ganja, kemudian ada ekstasi ribuan butir, ya. Kemudian ada mesin, mesin pencetak ekstasi,” terang Bismo.

“Uang tunai ada. Hasil jadi satu sama barang bukti ganjanya. Jadi hasil penjualan ditaruh di situ berikut ganjanya, juga dengan uang tunainya,” imbuhnya.

Saat penggerebekan dilakukan, Bismo mengungkapkan bahwa perlawan sempat dilakukan sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan.

“Perlawanan itu wujud pengalihan perhatian dari zona yang menjadi target operasi kita, ya. Tapi kita tidak teralihkan terhadap fokus dari target operasi kita,” tambahnya.

Polda Metro Jaya juga menegaskan akan terus memburu bandar utama dan membongkar lapak-lapak liar yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba.

“kita akan terus lakukan operasi ini, ya, di berbagai tempat dan juga pengejaran terhadap bandarnya. Selain itu membongkar lapak juga supaya tidak disalahgunakan,” sambungnya.

Sementara itu, menurut keterangan dari BNN, penggerebekan dilakukan dengan membagi tim menjadi dua kelompok.

Tim pertama melakukan penyergapan dengan menumpangi 8 gerbong kereta api yang kemudian berhenti tepat di zona merah rawan peredaran narkoba di sepanjang rel kawasan Kampung Bahari.

Tim kedua kemudian bergerak menutup akses kampung bahari dari arah jalan raya R.E. Martadinata, Tanjung Priok. (*)

NASIONAL

Geger Isu Makar Oknum Polisi, Marthinus Hukom: Mantan Pimpinan Polri Catat Sejarah Terburuk Dunia!

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.42 WIB

Prabowo Subianto tampil berwibawa mengenakan jas abu-abu dan peci hitam saat meninjau upacara dari atas kendaraan militer terbuka. Beliau didampingi oleh beberapa petinggi militer

BANDA ACEH - Pernyataan keras mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom mengenai dugaan makar yang menyeret sejumlah oknum kepolisian menambah panas isu yang tengah mengguncang institusi Polri.

Melalui status WhatsApp, Marthinus melontarkan kritik tajam terhadap kabar dugaan keterlibatan segelintir oknum kepolisian dalam tindakan makar terhadap pemerintah. Pernyataan itu muncul di tengah beredarnya informasi mengenai sejumlah perwira tinggi Polri yang disebut-sebut diamankan.

Marthinus menilai, apabila desas-desus tersebut benar, peristiwa itu akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah kepolisian dunia.

Bahkan, ia secara terbuka menyindir mantan pimpinan Polri yang tidak disebutkan namanya dalam pernyataan tersebut.

"Dalam sejarah dunia tidak pernah ada Kepolisian melakukan makar terhadap pemerintah. Tapi kalau desas desus hari ini benar benar ADANYA, yang katanya ada segelincir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah merubah sejarah dunia. Dengan demikian semua prestasi anda adalah prestasi nomor satu. Terkorup, terjelek, terusak dan terakhir adalah mencatat untuk pertama kalinya melakukan MAKAR." ujar Marthinus dikutip Selasa (3/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dengan kalimat bersyarat. Artinya, Marthinus tidak menyatakan dugaan makar itu sebagai fakta yang telah terbukti, melainkan memberikan kritik apabila kabar yang beredar benar adanya.

Meski demikian, pilihan kata yang digunakan menunjukkan kerasnya kritik terhadap mantan pimpinan Polri. Ia bahkan menggunakan istilah "terkorup", "terjelek", dan "terusak" untuk menyindir rekam jejak kepemimpinan yang dimaksud.

Hingga kini, pernyataan Marthinus merupakan pandangan pribadi terhadap isu yang berkembang dan bukan bukti adanya tindakan makar maupun keterlibatan anggota kepolisian.

Pernyataan Marthinus muncul ketika Mabes Polri masih melakukan pengecekan terhadap kabar sejumlah perwira tinggi kepolisian yang disebut diamankan terkait pengerahan massa di Yogyakarta.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, informasi tersebut akan ditelusuri melalui proses evaluasi terhadap kegiatan pengamanan dan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.

"Tadi yang disampaikan nanti kami akan cek, karena selalu ada bagian kemudian proses evaluasi," kata Johnny usai Syukuran Hari Jadi ke-75 Humas Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Isir belum memberikan penjelasan spesifik mengenai kabar adanya perwira tinggi Polri yang diperiksa atau diamankan. Ia hanya menyatakan informasi tersebut akan ditelusuri melalui proses evaluasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerebek Pesantren Putri, Komisi III DPR Desak Kapolda Jateng dan Kapolres Sukoharjo Dicopot!

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.44 WIB

BANDA ACEH - Komisi III DPR RI mendesak Kapolri mengevaluasi Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo menyusul kontroversi penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an khusus putri di Kabupaten Sukoharjo, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menilai tindakan aparat dalam penggerebekan tersebut patut dipertanyakan karena diduga tidak mengedepankan prosedur hukum dan prinsip perlindungan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak.

Menurutnya, aparat seharusnya dapat melakukan pemeriksaan dengan cara yang lebih humanis dan menghormati lingkungan pesantren.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Irjen Eko Hadi Santoso: Kini Terseret Isu Operasi Internal Polri Bersama Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 3 Nov, 17.03 WIB

Irjen Pol Eko Hadi Santoso. FOTO/Net.

BANDA ACEH – Nama Irjen Pol Eko Hadi Santoso kembali menjadi sorotan publik.

Perwira tinggi lulusan Akpol 1999 yang sebelumnya dikenal sebagai reserse anti-teror lalu berprestasi membongkar sejumlah kasus narkoba besar ini kini disebut dalam isu operasi internal Polri yang juga menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Latar Belakang dan Profil Karier

Irjen Eko Hadi Santoso merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang angkatan ke-4 (lulus 1996) dan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999, Batalyon Endra Dharmalaksana.

Ia menjadi salah satu perwira angkatan 1999 yang cepat "pecah bintang".

Jejak jabatannya meliputi:

• Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya (2015)
• Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (2016)
• Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok (2018)
• Kabag Monev Robinopsnal Bareskrim Polri (2020)
• Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri (2022) — jabatan yang membawanya ke pangkat Brigjen
• Sebelum fokus pada narkoba, Eko lebih dikenal sebagai reserse yang berpengalaman di bidang penanganan tindak pidana terorisme.

Penunjukan oleh Listyo Sigit dan Prestasi di Bidang Narkoba

Pada Maret 2025, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Eko Hadi Santoso sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri melalui Surat Telegram ST/488/III/KEP./2025 tanggal 12 Maret 2025.

Ia menggantikan Brigjen Mukti Juharsa dan dilantik resmi pada April 2025.

Alasan penunjukan disebut untuk penyegaran organisasi dan penguatan institusi.

Eko sendiri menyatakan akan mengedepankan integritas dalam penegakan hukum.

Di bawah kepemimpinannya, Dittipidnarkoba membongkar sejumlah kasus menonjol, termasuk:

• Kasus yang melibatkan oknum Polri, seperti mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (tersangka kasus narkoba dan dugaan aliran dana dari bandar).
• Jaringan Planet di Batam (penggerebekan Agustus 2026 yang mengarah ke Basri Lewaimang dan Yuwanky).
• Sejumlah kasus etomidate/vape dan peredaran narkoba lainnya di berbagai daerah.

Pada 30 Agustus 2026, di era Listyo Sigit, Eko naik pangkat menjadi Irjen Pol dan diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri (ST/1877/VIII/KEP./2026).

Namun, jabatan itu hanya bertahan sekitar 40 hari.

Mutasi di Era Kapolri Baru

Setelah pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto pada awal Oktober 2026, Eko dimutasi pada 10 Oktober 2026 menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (ST/2251/X/KEP./2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dari Puan hingga Dasco: Siapa yang Siap Gantikan Gibran Jika Benar Dimakzulkan?

Oleh Redaksi · 2 Nov, 12.26 WIB

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA/sederajat saat mendaftar Pilpres 2024, serta putusan Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tersebut.

Meskipun MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, sejumlah pihak—termasuk pakar hukum tata negara dan sebagian fraksi di DPR—mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

Skenario ini tetap hipotetis dan secara Politik dinilai sulit karena dukungan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, namun publik dan analis tetap memperdebatkan siapa yang berpotensi menggantikannya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika wakil presiden berhenti, berhalangan tetap, atau diberhentikan (dimakzulkan), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif mengusulkan dua calon, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.

Proses pemakzulan sendiri diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang mensyaratkan usulan DPR dan proses di MK serta MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Belum ada nama resmi yang diusulkan Prabowo. Nama-nama yang beredar murni spekulasi analis, politisi, dan wacana publik.

Nama yang paling sering disebut mencakup spektrum politik dari luar hingga dalam lingkaran pemerintahan.

Sebagai Ketua DPR dan tokoh senior PDI Perjuangan, Puan sering disebut sebagai kandidat potensial untuk membangun keseimbangan politik dan menarik dukungan elektoral PDIP (pemenang Pileg). Mahfud MD pada 2025 menyebutnya sebagai simbol kekuatan politik senior dan stabilitas parlemen.

Namun, Puan sendiri menolak berspekulasi. Menjelang dan setelah putusan MK Oktober 2026, ia berulang kali menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum di MK dan keputusan apapun yang dihasilkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Divonis 8,5 Tahun Penjara, Sudewo Resmi Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Oleh Van · 3 Nov, 15.57 WIB

Bupati Pati nonaktif Sudewo. FOTO/Net.

JAWA TENGAH - Bupati Pati nonaktif Sudewo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun penjara dalam perkara korupsi.

Humas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Siti Suryati dalam keterangan resminya pada Selasa, (3/11/2026), membenarkan adanya pengajuan banding tersebut.

"Masalah berkasnya kapan dikirim, itu tergantung, tetapi ada tenggat waktunya," kata Siti.

Permohonan banding tersebut telah tercatat dalam sistem administrasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Namun, hingga Selasa (3/11/2026), pengadilan tingkat banding itu belum menerima pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Tipikor Semarang.

Menurut Siti, pencatatan perkara di tingkat Pengadilan Tinggi belum dapat dilakukan sepenuhnya sebelum berkas dari pengadilan tingkat pertama diterima.

Ada Batas Waktu Pengajuan Banding

Siti menjelaskan, terdakwa memiliki waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan untuk mengajukan permohonan banding.

Sementara itu, pengiriman berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan yang memeriksa perkara banding memiliki tenggat maksimal 14 hari.

Setelah seluruh berkas diterima, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memproses perkara tersebut untuk memasuki tahapan pemeriksaan banding.

Dengan demikian, proses hukum Sudewo kini berlanjut ke tingkat Pengadilan Tinggi setelah sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pada 21 Oktober 2026.

Sidang Banding Direncanakan Secara Virtual

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga merencanakan persidangan banding Sudewo digelar secara virtual.

Rencana tersebut mempertimbangkan kapasitas ruang sidang. Melalui mekanisme persidangan daring, terdakwa tetap dapat mengikuti rangkaian persidangan dari fasilitas yang disiapkan melalui pengadilan negeri maupun koordinasi dengan kejaksaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hak Sudewo untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum juga tetap dijamin selama proses persidangan.

Masyarakat pun disebut tetap dapat mengikuti jalannya persidangan melalui akses daring yang disediakan pengadilan.

"Daring pun nanti kita akan berikan akses untuk bisa mengikuti keseluruhan, terutama untuk umum," imbuh Siti.

Sudewo Divonis 8,5 Tahun

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara kepada Sudewo dalam sidang yang digelar Rabu (21/10/2026).

Selain pidana penjara, Sudewo juga dijatuhi denda sebesar Rp300 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk melunasi pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari," …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Tinjau Strong Point, Wakapolda Aceh Pastikan Arus Lalu Lintas Aman dan Lancar

Oleh Redaksi · 2 Nov, 23.50 WIB

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman meninjau langsung pelaksanaan pengaturan lalu lintas pagi atau strong point di Simpang Jamboe Tape, Kota Senin (2/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman dan lancar serta aktivitas masyarakat pada pagi hari berjalan tertib.

Dalam kegiatan tersebut, Latif melihat langsung pelaksanaan tugas personel di lapangan, terutama dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Status WA Eks Kepala BNN Singgung Polisi Makar, di Tengah Isu Penangkapan Jenderal Sadap Presiden

Oleh Redaksi · 3 Nov, 17.17 WIB

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Martinus Hukom. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Martinus Hukom, melontarkan kritik keras di tengah beredarnya isu dugaan makar yang disebut menyeret sejumlah oknum kepolisian.

Sorotan Martinus tertuju pada kabar penangkapan sejumlah jenderal polisi yang ramai diperbincangkan.

Melalui status WhatsApp, Martinus menyinggung kemungkinan adanya oknum kepolisian yang terlibat dalam dugaan makar terhadap pemerintah.

Ia bahkan menyebut, jika kabar tersebut benar, peristiwa itu akan menjadi catatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah kepolisian dunia.

Tak hanya itu, Martinus juga melontarkan kritik tajam terhadap seorang mantan pimpinan Polri yang tidak disebutkan namanya.

Dalam pernyataannya, ia menilai mantan pimpinan tersebut akan mencatatkan sejarah buruk apabila dugaan keterlibatan oknum polisi dalam makar terbukti.

"Dalam sejarah dunia tidak pernah ada Kepolisian melakukan makar terhadap pemerintah. Tapi kalau desas desus hari ini benar benar ADANYA, yang katanya ada segelincir oknum kepolisian melakukan makar, maka Anda sebagai mantan pemimpin Polri telah merubah sejarah dunia," tulis Martinus.

Ia kemudian melanjutkan kritiknya dengan menyebut sejumlah istilah keras terhadap rekam jejak mantan pimpinan Polri tersebut.

"Dengan demikian semua prestasi anda adalah prestasi nomor satu. Terkorup, terjelek, terusak dan terakhir adalah mencatat untuk pertama kalinya melakukan MAKAR," lanjutnya.

Pernyataan Martinus disampaikan dengan kalimat bersyarat. Ia menekankan kritik tersebut berkaitan dengan kabar yang beredar mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum kepolisian dalam tindakan makar.

Hingga saat ini, pernyataan tersebut merupakan pandangan Martinus terhadap isu yang berkembang.

Belum ada informasi dalam pernyataan tersebut yang dapat memastikan kebenaran dugaan makar maupun keterlibatan anggota kepolisian.

Mabes Polri Cek Kabar Petinggi Polisi Diamankan

Markas Besar (Mabes) Polri akan mengecek kabar sejumlah perwira tinggi kepolisian yang disebut diamankan terkait pengerahan massa di Yogyakarta.

Pemeriksaan informasi tersebut akan dilakukan melalui proses evaluasi terhadap kegiatan pengamanan dan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, evaluasi merupakan bagian dari prosedur yang dilakukan setelah kepolisian menjalankan tugas pengamanan aksi.

"Tadi yang disampaikan nanti kami akan cek, karena selalu ada bagian kemudian proses evaluasi," kata Johnny usai Syukuran Hari Jadi ke-75 Humas Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Berbarengan Kedatangan Jokowi di Jakarta, Kabar Pengamanan Sejumlah Jenderal Polri

Oleh Redaksi · 3 Nov, 17.31 WIB

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berada di Jakarta. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berada di Jakarta.

Ia berangkat dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah, beberapa hari lalu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa).

Sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026.

Polres Metro Jakarta Timur sudah menyiapkan pengamanan berlapis tiga ring di lokasi persidangan.

Jokowi dan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, juga dijadwalkan bersaksi.

Pihak pengadilan dan jaksa penuntut umum telah mengonfirmasi rencana kehadiran mantan Presiden itu.

Di waktu yang hampir bersamaan, beredar kabar penangkapan atau pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Informasi yang beredar sejak dini hari Selasa (3/11/2026) menyebut para perwira dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok.

Nama-nama yang disebut dalam berbagai laporan dan pesan internal yang beredar di antaranya Irjen Pol Ahrie Sonta (Kepala Divisi Hukum Mabes Polri) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Beberapa sumber juga menyebut keterlibatan perwira berpangkat jenderal bintang empat berinisial L, yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sejumlah laporan menyebut Listyo sempat diperiksa sebelum kemudian dilepas.

Dugaan yang berkembang adalah terkait aktivitas penyadapan terkoordinasi terhadap petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir merespons bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi internal.

Ia menyatakan Polri akan memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk melalui konferensi pers yang dijadwalkan sore menjelang malam hari ini.

Hingga sore ini, belum ada konfirmasi resmi lengkap dari Mabes Polri mengenai identitas, jumlah, status hukum, atau motif pasti dari pengamanan tersebut.

Kehadiran Jokowi di Jakarta murni terkait agenda sidang kasus ijazahnya, sementara kabar pengamanan jenderal Polri masih berstatus informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi.

Perkembangan kedua isu ini terus dipantau publik mengingat sensitivitasnya, baik terkait kasus hukum yang melibatkan mantan Presiden maupun dinamika internal Polri pasca-pergantian Kapolri beberapa waktu lalu.

Mabes Polri dijanjikan akan memberikan klarifikasi resmi dalam waktu dekat.

NASIONAL

Legitimasi Gibran sebagai Wapres Sudah Retak

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.37 WIB

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka batal demi hukum sejak awal menyisakan persoalan serius terkait legitimasi jabatan Wakil Presiden.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menilai terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan legitimasi demokrasi konstitusional setelah dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan Gibran dinyatakan tidak sah.

Menurutnya, secara logika formal, cacat pada fondasi pencalonan semestinya turut memengaruhi keabsahan jabatan yang diperoleh melalui proses tersebut.

Namun, hukum tata negara Indonesia membedakan secara tegas antara syarat pencalonan dan status jabatan.

"Sesuatu yang dibangun di atas dasar yang batal, seharusnya ikut cacat. Namun hukum tata negara Indonesia tidak bekerja dengan logika linear semata. Ia membedakan secara ketat antara syarat pencalonan dan status jabatan," kata Didik lewat akun X miliknya, Selasa, 2 November 2026.

Didik menjelaskan, syarat pencalonan berada dalam ranah hukum administrasi dan hukum pemilu.

Sementara status jabatan lahir melalui rangkaian proses konstitusional, mulai dari penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemeriksaan sengketa oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pelantikan dan pengucapan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Setelah sumpah diucapkan, menurut Didik, lahir status hukum baru yang mandiri dan tidak lagi bergantung secara langsung pada keabsahan dokumen pencalonan.

Konstruksi tersebut disebut sebagai pemutusan hubungan hukum atau legal discontinuity.

Mekanisme ini dirancang untuk menjaga kepastian hukum sekaligus stabilitas pemerintahan.

Namun, Didik mengingatkan, konstruksi hukum tersebut juga memiliki konsekuensi serius karena memungkinkan seseorang tetap menduduki jabatan negara meskipun syarat pencalonannya dinyatakan cacat.

"Ia menunda penyelesaian persoalan legitimasi ke mekanisme pemakzulan yang sangat politis dan sulit ditempuh. Dan ia menciptakan dualisme yang mengganggu: formalitas tetap tegak, sementara legitimasi retak," ujarnya.

Menurut Didik, persoalan tersebut memperlihatkan ketegangan antara hukum positif yang mengutamakan kepastian dan demokrasi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Panas! Herry Pras Digas Petarung Road to UFC, Berawal dari Kritik terhadap Abdul Somad dan Adi Hidayat

Oleh Redaksi · 2 Nov, 15.55 WIB

BANDA ACEH - Konfrontasi antara YouTuber Herri Pras dan petarung MMA Yudi Cahyadi viral di media sosial setelah Yudi datang ke rumah Herri menyusul tantangan duel sampai mati yang beredar di media sosial.

Kejadian ini terkait kritik keras Herri terhadap Abdul Somad alias UAS dan Adi Hidayat alias UAH.

Menurut keterangan dalam reel Instagram dari akun abi.dzar_alghifary, Yudi Cahyadi—sesama insan beladiri—mendatangi rumah Herri Pras setelah tantangan berkelahi sampai mati dilontarkan Herri lewat media sosial.

Tantangan itu ditolak karena Herri mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu bahwa UAS dan UAH bukan ulama munafik seperti yang ia tuduhkan.

Dalam video tersebut juga muncul momen yang digambarkan "digas malah sesak nafas", yang memicu reaksi netizen.

Herri Pras sendiri merespons tantangan tersebut melalui video YouTube berjudul "Herri Pras Ultimatun Yudi Cahyadi Untuk Duel Sampai Mati Dengan Syarat Pembuktian Ini" yang diunggah sekitar 27 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Irjen Pol Ahrie Sonta, Orang Kepercayaan Listyo Sigit yang Pernah Dijadikan Ajudan Prabowo

Oleh Redaksi · 3 Nov, 16.37 WIB

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution saat berjalan bersama Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Nama Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution kembali mencuri perhatian setelah dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto itu kini menyandang pangkat jenderal bintang dua, hanya sekitar setahun setelah memperoleh pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Namun, perjalanan karier Ahrie tidak hanya menarik karena kenaikan pangkatnya yang tergolong cepat.

Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 tersebut memiliki rekam jejak penugasan bersama dua tokoh penting dalam pemerintahan dan kepolisian, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum masuk ke lingkungan Istana Kepresidenan, Ahrie merupakan sekretaris pribadi Listyo Sigit ketika menjabat Kapolri.

Hubungan kedinasan keduanya bahkan dapat ditelusuri lebih jauh, ketika Listyo masih memimpin Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Kini, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, karier Ahrie kembali menanjak.

Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Suyudi melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.

Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Ahrie Sonta Nasution yang ditunjuk sebagai Kadivkum Polri menggantikan Irjen Pol Agus Nugroho.

Sebelumnya, Ahrie menjabat Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dengan pangkat Brigjen Pol.

Promosi menjadi Kadivkum membawa Ahrie ke jenjang kepangkatan Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).

Jejak Bersama Listyo Sigit dalam Penangkapan Djoko Tjandra

Hubungan kedinasan Ahrie dengan Listyo Sigit sudah terlihat sejak 2020.

Ketika itu, Listyo masih menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan pangkat komisaris jenderal. Salah satu perkara besar yang ditanganinya adalah perburuan Djoko Soegiarto Tjandra, buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Djoko Tjandra akhirnya ditangkap di Malaysia pada 30 Juli 2020 setelah menjadi buronan selama sekitar 11 tahun.

Operasi tersebut dipimpin Listyo Sigit melalui tim khusus Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia.

Ahrie tercatat menjadi bagian dari tim yang terlibat dalam penangkapan tersebut.

Penugasan itu menjadi salah satu jejak awal hubungan kerja Ahrie dengan Listyo dalam penanganan perkara besar di lingkungan Bareskrim.

Setahun kemudian, hubungan kedinasan keduanya berlanjut ke lingkungan pimpinan tertinggi Polri.

Dipercaya Jadi Sekretaris Pribadi Kapolri

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo, Beathor: Pengalihan Isu Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 2 Nov, 19.51 WIB

BANDA ACEH - Penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, menuai kritik.

Kali ini, kritik datang dari politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, yang mempertanyakan cara aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan khusus perempuan tersebut.

Beathor bahkan mengaitkan perhatian publik terhadap peristiwa itu dengan dinamika Politik nasional, khususnya polemik mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Apa masalah di pondok putri pesantren itu? Kok polisi harus menyerbu pada waktu subuh dengan senjata laras panjang, mendobrak pintu dan berteriak dengan ganas?" kata Beathor, Senin (2/10/2026).

Ia mempertanyakan urgensi pengerahan aparat bersenjata dalam jumlah besar untuk melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren putri.

"Ini pondok putri. Apa mereka mau berontak dengan senjata atau itu gudang narkoba? Kenapa tidak menunggu pagi? Kenapa harus satu batalion?" ujarnya.

Menurut Beathor, cara aparat melakukan penggeledahan tersebut perlu dipertanyakan, terutama karena lokasi yang didatangi merupakan tempat tinggal para santriwati yang sedang beristirahat.

Ia menilai penegakan hukum semestinya tetap memperhatikan kondisi psikologis, keamanan, privasi, dan martabat perempuan, terlebih apabila terdapat anak-anak di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, Beathor melihat peristiwa penggerebekan pesantren tersebut telah menggeser perhatian masyarakat dari polemik politik mengenai Gibran.

"Yang jelas, kejadian di pondok putri itu telah mengalihkan isu dari pemakzulan Gibran ke pondok," tegasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jenderal Bintang 4 Inisial L Sempat Diamankan lalu Dilepas, Benarkah Mantan Kapolri?

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.56 WIB

Ilustrasi Perwira tinggi dikawal dua pasukan khusus bersenjata lengkap. FOTO/AI.

BANDA ACEH – Kabar mengejutkan beredar dari internal Mabes Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri bersama satuan khusus, termasuk unsur Brimob, diamankan sejumlah perwira tinggi pada Selasa (3/11/2026).

Salah satunya adalah jenderal bintang empat (Jenderal Polisi) berinisial L yang kini menjabat di posisi sipil pemerintahan. Ia kemudian dilepas setelah menjalani pemeriksaan.

Sumber internal yang dikutip berbagai media menyebut jenderal bintang empat tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) atau Kepala Staf Kepresidenan.

Ia masih berstatus aktif di Polri dan menyandang pangkat jenderal sejak 27 Januari 2021.

Listyo digantikan sebagai Kapolri oleh Jenderal Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026, kemudian diangkat Presiden Prabowo Subianto ke posisi KSP.

Menurut informasi yang beredar, pengamanan dilakukan secara senyap. Para perwira dibawa untuk pemeriksaan di Divpropam, sebagian sempat diamankan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Selain Listyo, disebut ada beberapa jenderal bintang tiga (Komjen) dan perwira lain yang turut diperiksa. Sumber menyebutkan Listyo sudah dilepas, sementara proses terhadap yang lain masih berlanjut.

Materi pemeriksaan disebut terkait persoalan sensitif yang menyangkut stabilitas internal Polri di masa transisi kepemimpinan baru.

Beberapa laporan menyebut dugaan terkait kebocoran kerahasiaan negara atau isu penyadapan.

Salah satu situs bahkan secara spesifik menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Listyo bersama beberapa perwira lain (antara lain Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso).

Laporan lain mengaitkannya dengan dugaan pengerahan massa di Yogyakarta.

Hingga sore hari, belum ada klarifikasi resmi lengkap dari Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengakui adanya pembicaraan di kalangan wartawan dan berjanji akan menyampaikan informasi, namun belum merinci identitas maupun materi pemeriksaan.

Saat ditanya soal isu penyadapan atau pengerahan massa, responsnya lebih mengarah pada evaluasi pengamanan dan pelayanan pascatugas.

Kejadian ini terjadi tepat sebulan setelah pelantikan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, yang menekankan konsolidasi internal dan pemulihan kepercayaan publik.

Jenderal Bintang 4 Aktif di Polri Saat Ini

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Polri, terdapat tiga jenderal bintang empat (Jenderal Polisi) yang masih aktif secara bersamaan. Biasanya hanya Kapolri yang menyandang pangkat tersebut. Berikut daftarnya per November 2026:

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Antisipasi Banjir, Bupati Aceh Barat Matangkan Kesiapsiagaan

Oleh Aceh Barat · 2 Nov, 17.02 WIB

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadheil memimpin rapat kerja (raker) seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Senin (2/11/2026).

Raker tersebut membahas percepatan realisasi anggaran serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, terutama banjir yang mulai terjadi di wilayah Aceh Barat.

Tarmizi mengatakan, banjir yang terjadi pada awal November telah menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan bencana yang lebih besar, terutama menjelang akhir tahun.

"Persiapan harus matang agar tidak ada korban jiwa dan dampak bencana bisa diminimalkan," kata Tarmizi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jaksa Siapkan 103 Saksi untuk Bongkar Perkara Febrie Adriansyah

Oleh Van · 3 Nov, 14.55 WIB

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menyiapkan 103 saksi dan lima ahli untuk membuktikan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Rencana menghadirkan puluhan saksi dan ahli itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

"Dalam rangka pembuktian perkara ini, penuntut umum akan mengajukan alat bukti sebagai berikut. Keterangan saksi sebanyak 103 orang. Keterangan ahli sebanyak lima orang," ujar JPU dalam pernyataan pembuka persidangan.

Febrie dikenal merupakan terdakwa bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin dalam perkara tersebut.

Selain keterangan saksi dan ahli, jaksa juga akan menghadirkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara.

JPU turut menyiapkan bukti elektronik berupa alat komunikasi yang disebut memuat percakapan WhatsApp antara para saksi dengan pihak-pihak terkait.

"Bukti elektronik antara lain berupa alat komunikasi yang di dalamnya terdapat bukti percakapan WhatsApp antara saksi-saksi dengan pihak terkait serta alat bukti lain yang relevan," kata JPU.

Jaksa kemudian meminta majelis hakim memberikan kesempatan untuk membuktikan seluruh dakwaan melalui alat bukti yang akan dihadirkan selama persidangan.

"Selanjutnya penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang akan kami ajukan secara saksama, adil, dan objektif sesuai prinsip persidangan yang jujur dan berimbang," ucap dia.

Febrie Didakwa Terima Ratusan Miliar

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 7 Oktober 2026, JPU mendakwa Febrie menerima uang yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Total penerimaan yang didalilkan jaksa mencapai Rp346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut berlangsung pada periode 2020 hingga Juli 2026.

Penerimaan itu diduga berkaitan dengan jabatan Febrie ketika menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus maupun saat menjadi Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa dalam dakwaannya.

Salah satu penerimaan yang didalilkan jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura, atau sekitar Rp55 miliar, dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut disebut diterima Febrie melalui Ferry dan dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Pembalut Dipajak 11 Persen, Menteri PPPA: Sedang Koordinasi, Supaya Ada yang Menggembirakan

Oleh Van · 3 Nov, 15.16 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tampil anggun dalam balutan busana berwarna cerah. FOTO/Net.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi merespons pembalut yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Penerapan pajak pada pembalut ini tengah menjadi perhatian publik dan ramai disuarakan di berbagai platform media sosial.

Arifah mengingatkan bahwa pembalut merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan dengan biologis perempuan.

“Iya, itu kan kebutuhan dasar, ya, karena menstruasi itu kan biologis,” ujar Arifah kepada wartawan di kantor Kementerian PPPA, Jakarta Pusat pada Senin, 2 November 2026.

Lebih lanjut, Arifah mengungkapkan bahwa saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Meski tak memberi tahu secara rinci, ia meminta masyarakat untuk menunggu kabar baik hasil dari koordinasi tersebut.

“Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jadi, nanti ditunggu saja, tunggu kami koordinasinya seperti apa supaya ya ada sesuatu yang menggembirakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Arifah telah menegaskan bahwa pembalut bukan barang mewah karena sebagai barang kebutuhan utama biologis bagi perempuan.

“Pembalut bukan barang mewah, pembalut adalah kebutuhan utama saat menstruasi yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan,” kata Arifah dalam siaran pers yang diunggah di Instagram @kemen.pppa pada 31 Oktober 2026 lalu.

Arifah juga menyinggung tentang pembalut yang harus ada dalam setiap bantuan untuk masyarakat saat terjadi bencana.

“Dalam situasi bencana, pembalut menjadi salah satu perlengkapan yang harus disiapkan dalam dignity kit,” lanjutnya.

“Perempuan tetap mengalami menstruasi bulanan meskipun berada dalam kondisi darurat,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurutnya, sudah seharusnya perempuan mendapat akses kebutuhan menstruasi yang aman, layak, dan tanpa stigma rasa malu.

Adapun menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pembalut yang ada di Indonesia merupakan barang kena pajak (BKP), sehingga pembeliannya harus dikenai PPN.

“Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan BKP yang dikenai PPN, sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya pada 29 Oktober 2026 lalu.(*)

ACEH

Mualem–Dek Fadh Minta Pusat Tuntaskan Persoalan Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Lapangan Blang Padang

Oleh Redaksi · 2 Nov, 22.26 WIB

JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, serta penyelesaian persoalan Bendera Aceh.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu, Mualem dan Dek Fadh turut didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Dudung Abdurachman, bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Di hadapan jajaran menteri, Mualem meminta Pemerintah Pusat segera mengambil langkah konkret atas ketiga agenda strategis yang menyangkut kekhususan Aceh tersebut.

Menurutnya, komunikasi dan sinergi yang solid antara pusat dan daerah sangat krusial untuk menghadirkan kepastian bagi masyarakat Aceh.

“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.

Merespons hal itu, Dudung Abdurachman memastikan Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk mengawal penyelesaian berbagai tuntutan tersebut.

Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan negara akan hadir memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Pemerintah Pusat juga menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutan Dana Otsus sebagai instrumen vital penopang pembangunan Aceh di masa mendatang.

“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” kata Dudung.

Mengenai Bendera Aceh, Dudung menyebut pemerintah akan mengedepankan ruang dialog yang konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna merumuskan solusi terbaik.

“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” tambahnya.

Rakor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Puskesmas dan Dokkes Polres Aceh Selatan Periksa Kesehatan 140 Pengungsi Banjir Trumon

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.03 WIB

ACEH SELATAN – Sebanyak 140 pengungsi banjir di kawasan Trumon Raya, Kabupaten Aceh Selatan, menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tenaga medis UPTD Puskesmas Ladang Rimba bersama personel Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polres Aceh Selatan.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di lokasi pengungsian Kompi Brimob, Gampong Ie Jerineh, Kecamatan Trumon Tengah.

Pelayanan medis ini dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah rumah mereka terdampak banjir.

Kepala UPTD Puskesmas Ladang Rimba, Linda Kusuma, mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui kolaborasi tenaga kesehatan puskesmas dan Dokkes Polres Aceh Selatan.

“Kami berkolaborasi dengan Dokkes Polres Aceh Selatan memberikan pelayanan medis secara langsung di lokasi pengungsian. Ada sebanyak 140 pengungsi yang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan sejumlah penyakit dikeluhkan para pengungsi,” kata Linda di Aceh Selatan, Senin, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat lima jenis penyakit yang paling banyak dikeluhkan para pengungsi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Denny Indrayana Sebut Gibran Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres, Pemakzulan Harus Jalan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.28 WIB

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat dasar untuk memproses pemakzulan.

Menurutnya, putusan MA tersebut mengonfirmasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan calon wakil presiden.

Denny berpandangan Gibran tidak lagi memenuhi syarat pendidikan untuk menjabat sebagai wakil presiden setelah kedua putusan tersebut.

"Lewat putusan MK yang dikonfirmasi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, maka Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, terutama dalam konteks ini adalah syarat pendidikan," kata Denny kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Dia menegaskan, mekanisme hukum yang dapat ditempuh berbeda karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden.

Denny merujuk pada putusan MK yang membedakan penanganan persoalan sebelum dan setelah pelantikan.

"Jadi ini penting untuk menegaskan harusnya proses pemakzulan berjalan. Kenapa proses pemakzulan pasca ini? Karena setelah putusan MK memang ditarik garis demarkasi lebih tegas, yaitu setelah pelantikan, yang terjadi kalau ada masalah-masalah dengan presiden dan wakil presiden adalah removal from office, proses pemakzulan, bukan diskualifikasi kata MK," ujarnya.

Denny menjelaskan, diskualifikasi masih dimungkinkan jika persoalan muncul sebelum pelantikan, karena masuk dalam ranah hukum pemilu.

"Kalau sebelum pelantikan, masih mungkin itu rezim pemilu, masih mungkin diskualifikasi," tuturnya.

MA sebelumnya mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.

Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).

Perkara ini bermula dari gugatan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut tidak diterima, lalu berlanjut ke tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta sebelum perkara dibawa ke MA.

Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam putusan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kelompok Jokowi dan Listyo Sigit Tidak Akan Tinggal Diam!

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.22 WIB

BANDA ACEH - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim imbas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025.

Publik sudah mengetahui bahwa LSP merupakan orang yang tegak lurus terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut pakar ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, kubu Jokowi-LSP tidak akan tinggal diam terhadap tindakan ini.

"Penyadapan (dilakukan) 2025-2026, maka mustahil tidak ada tujuan politik. Lalu apa tujuan politik mereka jika LSP adalah kaki tangan Jokowi? Akankah Jokowi diam? No, ini terkait keputusan MK dan MA," kata Noorsy kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026.

Ia menduga hal ini juga terkait dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya, hal itu sudah diantisipasi Jokowi dari jauh hari.

"Bagi Jokowi, menyerang balik atau mati. Karena hukuman sosial akan lebih kejam bagi anak keturunannya. Jadi akan ada pembalasan kelompok Jokowi-LSP," tegasnya.

Noorsy melihat bahwa penetapan tersangka terhadap LSP merupakan, langkah tegas yang dilakukan oleh Prabowo dan Polri.

"Penyadapan ilegal biasanya oleh badan intelijen. Kenapa BIN diam. Untung, Propamnya bernyali. Artinya konflik internal polri mendalam," ungkapnya.

Bahkan ia menyebut konflik ini bisa berlangsung lama hingga 2029 akibat dari sistem ketatanegaraan yang mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen atau UUD 2002.

"Artinya, konflik ini akan berlangsung sampai dengan 2029. Jadi jangan mimpi ada kondisi kondusif. Karena selain sistemnya yang memproduksi kegaduhan, pelakunya pun membuat gaduh," pungkasnya.

NASIONAL

Listyo Sigit Rencanakan Makar? Ini Kata Yusril

Oleh Redaksi · 3 Nov, 21.36 WIB

BANDA ACEH - Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah ketahuan menyadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo, Mabes Polri juga menangkap dan menetapkan dua jenderal lainnya, Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, sebagai tersangka dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa malam (3/11/2026). Betulkah perbuatan tiga jenderal ini terkait makar?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan sampai saat ini belum ada indikasi penyadapan tersebut terkait makar.

"Kami ingin memastikan bahwa sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal penyadapan dan eksepsi, baik KUHP maupun undang-undang, dan sama sekali enggak digunakan pasal-pasal yang terkait makar," kata Yusril dalam jumpa pers di kantornya, Selasa malam.

Menurutnya, pasal makar diatur secara spesifik dalam undang-undang. Di samping itu ada pasal lain tentang pemberontakan dan makar terkait pihak asing.

"Tapi sampai sejauh ini tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan. Tapi apa materi yang disadap, untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan? Masih dalam proses penyidikan dan masih dalam tahap awal saat ini. Sampai hari ini belum dapat diumumkan karena masih pendalaman," kata Yusril.

Menurutnya, penyadapan adalah tindak pidana serius dan masuk tindak pidana, sehingga bisa menjadi alasan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan.

EDUKASI

Pemkab Aceh Besar Terima 516 Mahasiswa KPM UIN Ar-Raniry di Lhoknga

Oleh Redaksi · 2 Nov, 22.56 WIB

ACEH BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menerima sebanyak 516 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang akan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Reguler Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 di 33 gampong dalam Kecamatan Lhoknga dan Leupung.

Serah terima mahasiswa berlangsung di Kantor Camat Lhoknga, Senin (2/11/2026), ditandai dengan penyerahan secara simbolis dari pihak UIN Ar-Raniry kepada Pemkab Aceh Besar, kemudian diteruskan kepada Camat Lhoknga dan Leupung untuk selanjutnya ditempatkan di masing-masing gampong.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Fata Muhammad, menyambut baik kehadiran ratusan mahasiswa tersebut. Ia berharap kegiatan KPM menjadi momentum memperkuat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan gampong.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, saya menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada Rektor beserta seluruh jajaran UIN Ar-Raniry yang telah mempercayakan Kecamatan Lhoknga dan Leupung sebagai lokasi pelaksanaan KPM. Kami menyambut baik kehadiran mahasiswa ini sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan kehidupan masyarakat,” ujar Fata saat menyampaikan arahan Bupati.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya datang untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan, kreativitas, dan gagasan yang diharapkan mampu membantu masyarakat mengembangkan potensi lokal.

Ia menyebutkan, Lhoknga dan Leupung memiliki beragam potensi, mulai dari sektor pesisir, pertanian, perikanan, pariwisata hingga kekayaan sosial budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, menggali potensi setiap gampong, memperkuat kapasitas generasi muda, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan literasi digital, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jangan hanya melihat apa yang menjadi kekurangan suatu gampong, tetapi lihatlah potensi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketua Kpk Ingatkan Nusron Wahid: Jangan Mangkir! Penyidik Punya Opsi Penjemputan Paksa

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.35 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak mengabaikan panggilan pemeriksaan penyidik terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Setyo menegaskan, setiap orang yang telah dipanggil secara resmi oleh penyidik memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan maupun kedudukan seseorang tidak menghilangkan kewajiban untuk menghormati proses penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Setyo saat ditanya mengenai kemungkinan langkah penyidik apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, termasuk opsi penjemputan paksa.

"Kalau saya tentu harapan yang pertama, yang bersangkutan hadir. Kan ini tanggung jawab juga, ya, dan itu adalah ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang dipanggil, karena pemanggilan itu kan ada aturannya," ujar Setyo di Gedung Dewan Pengawas KPK C1, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Mangkir Bisa Berujung Langkah Hukum

Setyo menjelaskan, KPK pada prinsipnya mengharapkan proses pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme hukum tanpa harus menggunakan tindakan paksa untuk menghadirkan pihak yang dibutuhkan keterangannya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyidik memiliki mekanisme dan strategi tersendiri dalam menentukan langkah lanjutan terhadap pihak yang belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Termasuk kemungkinan penerapan ketentuan dalam KUHAP baru mengenai pemanggilan kedua yang dapat disertai surat perintah membawa.

Menurut Setyo, keputusan mengenai langkah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan pertimbangan penyidik.

Artinya, penjemputan paksa bukan tindakan otomatis setiap kali seseorang tidak memenuhi panggilan, melainkan salah satu opsi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan strategi penyidikan.

Setyo juga berharap Nusron menunjukkan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

Sebelumnya, penyidik KPK telah memanggil Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Keterangan Nusron dinilai diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Setyo menegaskan, KPK masih memberikan ruang kepada Nusron untuk hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik.

Ia berharap pemeriksaan tersebut dapat segera terlaksana sehingga proses penyidikan berjalan sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, KPK masih memiliki sejumlah agenda penyidikan yang harus diselesaikan, mulai dari pemeriksaan saksi, penelusuran aliran uang, hingga pendalaman dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Terungkap Iming-iming Gaji hingga Rp620 Juta

Oleh Van · 3 Nov, 15.43 WIB

Petinggi kepolisian memberikan pernyataan resmi dalam sebuah konferensi pers untuk menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat. FOTO/Net.

JAKARTA - Sebanyak 58 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan sebagai tentara bayaran di Rusia.

Para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji dan bonus fantastis, tetapi justru diarahkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia dan berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Dalam penyelidikan kepolisian, korban tak hanya dari kelompok warga sipil, tetapi juga ada mantan TNI dan Polri.

“Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” ujar Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah kepada awak media di gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 2 November 2026.

Polisi menyebut bahwa 58 korban tersebut berasal dari lima laporan polisi yang ditangani Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah.

Tetapkan 13 Tersangka

Lebih lanjut, dari lima laporan tersebut, polisi telah menetapkan 13 tersangka, di mana dua di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) dari Rusia dan Ukraina.

Para pelaku diduga menjalankan perekrutan melalui media sosial, grup informasi lowongan pekerjaan, hingga aplikasi percakapan.

Korban awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, dan pembangunan pertahanan.

Namun, setelah tiba di Rusia, para korban justru diarahkan menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.

Iming-iming Gaji Besar

Adapun dalam perekrutan itu, para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab proses keberangkatan korban.

Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 1.000 Rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

“Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi,” terang Nurul.

“Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, para tersangka antara lain dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Perkuat Kolaborasi, Siapkan Layanan Publik Terpadu

Oleh Redaksi · 2 Nov, 23.22 WIB

SABANG – Pemerintah Kota (Pemko) Sabang terus mematangkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menggandeng sejumlah instansi vertikal.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Wali Kota Sabang dan pimpinan instansi vertikal sebagai upaya menyatukan berbagai layanan administrasi dan perizinan dalam satu tempat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam di Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Sabang, Senin (2/11/2026) sore.

Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang, para asisten, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran instansi vertikal.

Zulkifli mengapresiasi kesediaan seluruh instansi vertikal untuk bergabung dan bersinergi dalam penyelenggaraan MPP.

Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berkualitas.

Zulkifli menjelaskan, keberadaan MPP diharapkan dapat memangkas proses pelayanan yang selama ini mengharuskan masyarakat mendatangi sejumlah kantor berbeda.

Dengan berbagai layanan yang terintegrasi dalam satu lokasi, pengurusan administrasi maupun perizinan diharapkan menjadi lebih sederhana dan efisien.

“Melalui MPP, kita ingin masyarakat lebih mudah mendapatkan berbagai layanan tanpa harus mendatangi banyak tempat. Kerja sama dengan instansi vertikal ini diharapkan dapat menyatukan pelayanan, menyederhanakan proses pengurusan, serta menghemat waktu masyarakat,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, keberadaan MPP juga memiliki nilai strategis bagi Sabang sebagai daerah kepulauan sekaligus salah satu destinasi pariwisata unggulan di Aceh.

Sistem pelayanan yang responsif dan terintegrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung aktivitas pelaku usaha, serta menunjang perkembangan sektor pariwisata dan investasi daerah.

Zulkifli berharap kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diikuti dengan komitmen nyata setiap instansi dalam menyelaraskan prosedur pelayanan, memperkuat koordinasi, serta membangun pertukaran informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Bupati Aceh Barat Ancam Tindak ASN yang Nongkrong Saat Jam Kerja

Oleh Aceh Barat · 2 Nov, 15.22 WIB

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM mengancam akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam kerja. Bahkan, Satpol PP diminta membawa ASN yang melanggar ke kantor bupati untuk diproses.

Ancaman itu disampaikan Tarmizi saat memimpin apel bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Barat, Senin (2/11/2026).

Tarmizi mengatakan, ASN yang melanggar tidak lagi sekadar dicatat atau diperingatkan, tetapi akan dibawa menggunakan mobil patroli Satpol PP. Kepala dinas dan sekretaris dinas terkait juga akan dipanggil untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Ia turut menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bermasalah terancam tidak diperpanjang kontraknya pada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gawat! Sejumlah Jenderal Polri Diamankan, Rumor Menyadap Percakapan Petinggi RI Beredar

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.37 WIB

Petinggi kepolisian tampak dalam pengawalan ketat personel Brimob di sebuah gedung.

BANDA ACEH – Kabar beredarnya sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua diamankan personel Brigade Mobil (Brimob) dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menjadi perhatian publik pada Selasa (3/11/2026).

Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan dan media, penangkapan atau pengamanan tersebut diduga terjadi pada Senin (2/11/2026) sore hingga malam.

Sejumlah personel Brimob bahkan sempat terlihat mendatangi area Markas Besar (Mabes) Polri, kondisi yang disebut jarang terjadi.

Markas Besar Polri hingga sore hari belum memberikan konfirmasi resmi maupun bantahan tegas.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, saat ditanya wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, hanya menyatakan memahami pembicaraan yang berkembang.

“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” ujar Isir sambil tersenyum. Ia menjanjikan penjelasan lebih lanjut dalam waktu dekat: “Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya.”

Rumor Penyadapan dan Dugaan Lainnya

Informasi liar yang beredar menyebut kasus yang menjerat para jenderal tersebut terkait penyadapan percakapan sejumlah petinggi Republik Indonesia.

Selain itu, muncul pula spekulasi lain yang mengaitkan dengan kasus judi online (judol) hingga dugaan korupsi.

Namun, seluruh rumor tersebut belum terkonfirmasi oleh pihak terkait, termasuk Mabes Polri.

Hingga berita ini ditulis, belum ada nama spesifik jenderal yang disebut secara resmi, jumlah pastinya, maupun dasar hukum atau perkara yang menjadi alasan pengamanan. Beberapa laporan menyebut setidaknya dua jenderal berpangkat Irjen.

Konteks dan Perkembangan

Isu ini muncul di tengah dinamika kepemimpinan baru di tubuh Polri. Jenderal Suyudi Ario Seto baru dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sehari setelah pelantikan, Polri melakukan mutasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi dan menengah.

Kadiv Humas Polri menegaskan pihaknya akan mengecek dan menyampaikan informasi secara resmi.

Publik dan media masih menunggu klarifikasi resmi dari Mabes Polri terkait kebenaran isu ini serta detail perkara yang diduga menjadi latar belakangnya.

Artikel ini disusun berdasarkan laporan media dan pernyataan resmi yang tersedia hingga 3 November 2026. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau.

NASIONAL

Baru Menjabat, AKBP Rossa Purbo Bekti Dicopot dari Kapolres Bangkalan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 18.29 WIB

Seorang pria yang mengenakan jaket biru gelap dan kacamata tampak sedang berada di sebuah pertemuan resmi.

BANDA ACEH - - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Rossa Purbo Bekti yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, Jawa Timur. Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Pada telegram tersebut, mantan Penyidik KPK tersebut dimutasi menjadi perwira menengah (Pamen) Bareskrim Polri.

Sementara itu, jabatan Kapolres Bangkalan akan dijabat oleh AKBP Mustijat Priyambodo yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Jawa Timur.

Penunjukkan AKBP Rossa Purbo Bekti sebagai Kapolres Bangkalan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Adapun Kapolres yang dimutasi di antaranya:

- Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir menggantikan Kombes Dedi Supriyadi
- Kapolrestabes Palembang Kombes Heru Agung Nugroho menggantikan Kombes Sonny Mahar Budi
- Kombes Alfian Nurizal menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan
- Kombes Hendri Umar menjadi Kapolres Metro Jakarta Timur
- Kapolres Bangkalan AKBP Mustijat Priyambodo.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap 264 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada November 2026. Sejumlah Jenderal hingga pamen bergeser.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks," ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026

NASIONAL

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.25 WIB

BANDA ACEH - Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto

"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

INTERNASIONAL

Jet Learjet Jatuh Dekat Mar-a-Lago, Sistem Pertahanan Udara Jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 2 Nov, 19.39 WIB

BANDA ACEH – Kecelakaan pesawat jet pribadi jenis Learjet 60 di wilayah Palm Beach County, Florida, Amerika Serikat, pada 1 November 2026, memunculkan berbagai spekulasi di tengah pengerahan sistem pertahanan udara militer Amerika Serikat di sekitar kediaman Presiden Donald Trump, Mar-a-Lago.

Pesawat dengan nomor registrasi N722BD tersebut diketahui lepas landas dari Bandara Internasional Austin-Bergstrom, Texas, menuju Bandara North Eleuthera di Bahama.

Namun, ketika melintasi wilayah Florida, pesawat mengalami penurunan ketinggian secara cepat dan tidak terkendali sebelum akhirnya jatuh hampir secara vertikal di dekat persimpangan Military Trail dan 10th Avenue North, kawasan Greenacres/Cresthaven, Palm Beach County.

Seluruh sembilan orang yang berada di dalam pesawat dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, tidak ada korban luka yang dilaporkan di darat.

Benturan keras mengakibatkan terbentuknya kawah besar. Puing-puing pesawat serta kobaran api tersebar di kawasan permukiman rumah mobil.

Lokasi jatuhnya pesawat tersebut hanya berjarak beberapa mil dari Mar-a-Lago, kediaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Rekaman komunikasi pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Control (ATC) memperlihatkan bahwa awak pesawat sebelumnya melaporkan adanya lapisan es ringan yang masih dapat dikendalikan, turbulensi sedang, serta hujan.

Awak pesawat kemudian meminta izin untuk menaikkan ketinggian penerbangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gawat! Polri Tetapkan LSP Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.20 WIB

BANDA ACEH - Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Penetapan itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

"Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH," katanya.

Sementara satu orang lagi, menurut Asep, masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu saudara SU.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh Politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

NASIONAL

Golkar Tak Mau Ikut Campur Kasus yang Seret Nusron Wahid: Kami Serahkan ke KPK

Oleh Redaksi · 3 Nov, 10.00 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Partai Golkar menyatakan tidak mencampuri kasus dugaan suap yang menyeret nama kadernya sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, KPK memiliki kewenangan untuk menangani perkara dugaan korupsi sesuai amanat undang-undang.

“Sudah kita serahkanlah sepenuhnya kepada KPK,” kata Doli saat ditemui di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Doli menilai KPK merupakan lembaga penegak hukum yang paling memahami langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Karena itu, Golkar tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan.

“KPK-lah yang paling tahu langkah-langkah apa saja yang diambil, ya dalam terkait pemberantasan korupsi itu. Apalagi kalau misalnya ada indikasi-indikasi, kita serahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu juga mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan Nusron sejak nama Menteri ATR/BPN tersebut disebut dalam perkara yang belakangan mencuat.

Doli menyampaikan hal itu saat ditanya apakah dirinya pernah mengingatkan Nusron agar bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

“Tidak pernah ada komunikasi lagi ya setelah informasi terakhir soal Pak Nusron disebut-sebut namanya dalam kasus yang terakhir ini. Jadi saya belum ada komunikasi dengan Pak Nusron,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menuturkan, tim penyidik masih mengevaluasi rencana pemanggilan tersebut.

Namun, dia belum mengungkap jadwal pemeriksaan terbaru untuk Nusron.

"Sedang dievaluasi oleh tim terkait rencana pemanggilan yang bersangkutan (Nusron)," ucap Taufik kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Taufik menambahkan, belum ada hambatan tertentu dalam rencana pemeriksaan tersebut.

Saat ini, tim penyidik masih merumuskan langkah agar pemanggilan dapat terlaksana tanpa menghambat penanganan perkara.

"Tidak ada hambatan, hanya tim memang lagi rumuskan agar tidak berlarut-larut ke penanganan perkaranya," tuturnya.

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Prabowo, Muncul Dugaan Sosok Berinisial ‘J’

Oleh Redaksi · 3 Nov, 22.12 WIB

BANDA ACEH - Politikus sekaligus putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, menyoroti penetapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hanum, kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung selama periode 2025-2026 itu bahkan lebih gila dibandingkan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

"Jendral Pol L S P tersangka utama dalam penyadapan komunikasi Presiden pejabat tokoh Politik ormas media pengusaha dan semua tokoh tanpa dasar hukum dan prosedural selama 1 tahun! Gila! Ini Sambonya Sambo!" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (3/11).

Hanum juga menduga ada sosok yang memerintahkan Listyo Sigit untuk melakukan tindakan tersebut.

"Pertanyaannya: Siapa yang menyuruh perintah itu? Jawab L : J," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

Informasi tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

"Penyidik telah menetapakan 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, EH," kata Asep.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polri. Di antaranya Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri, Kadiv Propam Irjen Pol Nazly Harahap, serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

NASIONAL

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.19 WIB

Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang diduga tidak memeliki ijazah SMA/SLTA atau sederajat. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya menyangkut persoalan ijazah dan pemenuhan syarat pencalonan, hampir selalu mendapat pembelaan dari kelompok pendukungnya.

"Pembelaan itu entah dari relawan ataupun dari kader-kader PSI," kata Pengamat Politik Adi Prayitno, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Adi, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sejumlah fakta hukum yang menjadi dasar kritik terhadap Gibran tetap menjadi persoalan yang sulit dibantah.

Karena itu, Adi tidak heran ketika pernyataan Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat dan meminta Wapres mundur atau mengundurkan diri langsung mendapat respons dari politikus PSI, Bestari Barus.

Menurutnya, respons Bestari merupakan gambaran bagaimana pendukung Gibran sangat militan dan siap membela putra sulung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu mati-matian.

"Tawuran opini antara Jansen dengan Bestari Barus ini dianggap sebagai perang dua kubu yaitu PSI dan kubu Demokrat," pungkasnya.

LINGKUNGAN

Karhutla Papua Selatan Jadi Prioritas BNPB, 695 Hektare Area Terbakar

Oleh Van · 2 Nov, 17.02 WIB

PAPUA SELATAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan masih menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski luas area terbakar tercatat menurun, ratusan titik panas dan titik api masih terdeteksi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resminya pada Senin, (2/11/2026) mengatakan Papua Selatan masih menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla.

"Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, Papua Selatan masih menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla," kata Berton.

Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, luas area yang terbakar tercatat mencapai 695 hektare dengan 379 titik panas.

Selain 379 titik panas, BNPB mencatat masih terdapat 171 titik api. Sekitar 253 hektare area juga masih berstatus belum padam.

Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pemadaman di lapangan masih perlu diperkuat meskipun penanganan terus dilakukan.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada 31 Oktober 2026, terjadi penurunan pada sejumlah indikator. Titik panas turun dari 943 menjadi 379 titik.

Sementara itu, jumlah titik api berkurang dari 263 menjadi 171 titik. Luas area terbakar juga turun dari 1.742 menjadi 695 hektare.

Adapun luas area yang belum padam turun dari 577 menjadi 253 hektare.

"Perkembangan ini merupakan indikasi positif, tetapi tetap perlu diverifikasi melalui pemantauan dan pemeriksaan di lapangan. Angka luas terbakar merupakan hasil pemantauan geospasial dan dapat berubah mengikuti pembaruan data serta pemetaan," kata Berton.

Asap dan Titik Api Masih Terlihat di Merauke

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal sebelumnya melakukan pemantauan udara pada 31 Oktober 2026.

Dari pemantauan tersebut, kepulan asap dan sejumlah titik api masih terlihat di wilayah Kabupaten Merauke.

BNPB kemudian memperkuat penanganan melalui pemantauan berbasis satelit dan drone.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kisah Pilu Ibu di Jember Curi Beras demi Makan Kedua Anaknya usai Bercerai

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.24 WIB

BANDA ACEH - Pencurian 30 kilogram beras di toko kelontong kawasan Perumahan BTB, Kecamatan Kaliwates, Jember, menyisakan kisah pilu seorang ibu berinisial SN.

Perempuan tersebut nekat mencuri beras setelah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup bersama dua anaknya usai bercerai dari suami.

SN diketahui tinggal di rumah berdinding bambu di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Jember.

Di rumah sederhana itu, dia berjuang membesarkan kedua anaknya seorang diri.

Setelah bercerai, SN berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat upayanya mencari penghasilan tidak membuahkan hasil.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, SN akhirnya mencuri beras seberat 30 kilogram dari toko kelontong di kawasan Perumahan BTB, Kecamatan Kaliwates.

Beras tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan kedua anaknya.

Kondisi kehidupan SN terungkap setelah anggota DPRD Jember David Handoko Seto mendatangi kediamannya.

Dalam kunjungan tersebut, diketahui SN selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Kalau kita mencermati hari ini tidak sekadar kasus pidana, ini kan bencana kemanusiaan di mana wajib hukumnya untuk memanggil hati nurani orang-orang yang peduli untuk membantu beliau," ujar David.

Hal itu diduga karena data kependudukan SN masih tercatat di Madura, mengikuti alamat mantan suaminya.

Kondisi tersebut membuatnya belum terjangkau program bantuan sosial di tempat tinggalnya sekarang.

David Handoko Seto mengatakan, akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat SN melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice.

"Kami juga mengapresiasi kepada Pak Kapolres Jember dan seluruh jajaran, khususnya Polsek Kaliwates dan jajaran yang bisa memfasilitasi adanya restorative justice," ucapnya.

Selain itu, dia juga berjanji membantu mengupayakan agar kedua anak SN dapat bersekolah di Sekolah Rakyat.

Dengan demikian, keduanya tetap memperoleh hak pendidikan dan tidak putus sekolah.

Kisah SN menjadi gambaran persoalan sosial yang dapat muncul di balik tindak pidana, mulai dari kesulitan ekonomi, terbatasnya akses pekerjaan, hingga belum terjangkaunya bantuan sosial. Meski demikian, penyelesaian perkara tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

NASIONAL

MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Golkar Desak Pimpinan Parpol Segera Bertemu

Oleh Redaksi · 3 Nov, 09.54 WIB

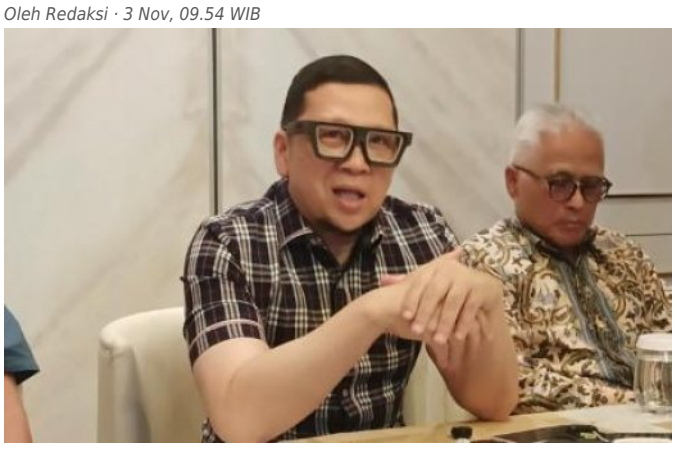

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendorong para pimpinan partai Politik (parpol) bertemu guna menentukan sikap atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait tidak sahnya surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, adanya putusan MA membuat urgensi pertemuan elit parpol semakin tinggi.

"Saya tetap mendorong bahwa ada harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, ya, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan MA ini. Kalau kemarin cuma putusan MK ya mungkin kita bisa masih punya waktu lah ya, tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini saya kira semakin mendesak untuk segera dibicarakan," kata Doli, dikutip Selasa (3/11/2026).

Doli pun berharap, pertemuan elit parpol memegang tiga prinsip utama.

Pertama, segala keputusan untuk menindaklanjuti putusan itu harus didasari atas kepentingan rakyat.

"Jadi artinya aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat yang genuine ya, itu betul-betul harus didengarkan. Nggak bisa diabaikan," ucapnya.

Kedua, tindak lanjut yang disepakati harus berdasarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi serta menjunjung etika dalam berbangsa dan bernegara.

"Nah, yang ketiga adalah ya ini juga harus menjadi pertimbangan yang serius. putusan yang akan diambil itu harus tetap berorientasi pada terjaganya keutuhan dan kedaulatan negara ya. Jangan sampai apa pun keputusan yang diambil itu ya mau diterusin atau tidak diteruskan ya, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, gitu ya," katanya.

Sebelumnya, MA memutuskan mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Putusan itu menyatakan Suket Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran batal demi hukum.

Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

"Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).

EKONOMI

Usai Diretas Rp114 Triliun, Binance Catat Arus Dana Keluar Rp66,06 Triliun

Oleh Van · 2 Nov, 17.12 WIB

JAKARTA – Bursa kripto Binance mencatat arus keluar dana bersih (net outflows) sekitar 3,64 miliar dollar AS atau Rp66,06 triliun setelah layanan penarikan dana kembali dibuka secara bertahap.

Dilansir dari data terbaru laman Binance pada Senin (2/11/2026) menunjukkan, dalam periode pukul 06.00 hingga 15.30 UTC pada Minggu, (1/11/2026), pengguna menarik dana sekitar 4,649 miliar dollar AS.

Arus dana keluar tersebut terjadi setelah Binance sebelumnya mengalami insiden peretasan yang berdampak pada aset kripto senilai sekitar 6,3 miliar dollar AS atau Rp114,41 triliun.

Pada periode yang sama, dana yang masuk melalui setoran mencapai sekitar 1,01 miliar dollar AS. Selisih antara penarikan dan setoran tersebut menghasilkan net outflow sekitar 3,64 miliar dollar AS.

Jika dibandingkan dengan total aset Binance yang mencapai sekitar 171 miliar dollar AS berdasarkan data proof of reserves per Rabu, (28/10/2026), arus keluar bersih tersebut setara dengan sekitar 2,1 persen dari total aset.

Binance mengatakan volume penarikan sempat melonjak ketika layanan kembali tersedia. Namun, setelah lonjakan awal tersebut, aktivitas penarikan mulai menurun dan berangsur stabil, sementara volume setoran masih cukup besar.

Penarikan Dibuka Bertahap

Binance mulai memulihkan layanan penarikan pada pukul 06.00 UTC atau sekitar pukul 13.00 WIB pada Minggu, (1/11/2026).

Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sejumlah jaringan dan aset.

Pada pukul 12.36 UTC, layanan penarikan telah kembali tersedia untuk seluruh 15 jaringan dan aset yang masuk dalam tahap pemulihan awal.

Binance kemudian masih melakukan pengujian terhadap jaringan dan aset lainnya sebelum layanan tersebut kembali sepenuhnya.

Perusahaan juga mengatakan telah mengambil langkah untuk memastikan sistem penarikan dapat kembali berjalan dengan aman dan stabil.

Binance Klaim Kerugian Ditanggung Perusahaan

Peretasan yang menimpa Binance menjadi perhatian besar karena nilai aset yang terdampak mencapai sekitar 6,3 miliar dollar AS.

Binance menyatakan akan menanggung dampak finansial dari aset yang dicuri dan tidak membebankan kerugian tersebut kepada para pengguna.

Dalam pembaruan sebelumnya, Binance menyebut sekitar 95 persen dari total nilai aset yang terdampak telah ditutup atau dipulihkan. Sementara sekitar 5 persen sisanya berkaitan dengan token dengan likuiditas lebih rendah sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diperoleh kembali.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Dekade Krisis Ekologi: Legitimasi Hukum dalam Hegemoni Oligarki

Oleh RADIT FABIAN · 2 Nov, 15.50 WIB

ALAM satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi krisis ekologis yang semakin akut.

Penyusutan hutan tropis, pencemaran sumber air, peningkatan polusi udara, serta bencana ekologis berupa banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi persoalan yang berulang.

Krisis tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan yang berdiri sendiri, melainkan telah memperlihatkan keterkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan, penguasaan sumber daya alam, dan relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Namun, alih-alih secara konsisten memperkuat perlindungan lingkungan, negara justru kerap terperangkap dalam logika pembangunan yang menempatkan investasi dan akumulasi kapital sebagai orientasi utama.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Binance Janji Ganti Aset Pengguna Usai Diretas Hacker

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.41 WIB

BANDA ACEH - Binance kembali membuka layanan penarikan Bitcoin dan sejumlah mata uang kripto lainnya setelah menghentikan sementara transaksi akibat pencurian aset digital senilai 6,3 miliar Dolar AS.

Bursa kripto terbesar di dunia itu mengklaim telah memulihkan dukungan hingga 90 persen dari aset yang terdampak dan memastikan kerugian akibat peretasan tidak akan dibebankan kepada pengguna.

Binance mengumumkan pembukaan kembali penarikan dana secara bertahap pada Minggu, 1 November 2026.

Jaringan Bitcoin menjadi yang pertama kembali beroperasi, disusul jaringan Ethereum dan BNB Smart Chain.

Dalam pernyataannya melalui platform X, Binance menyebut telah menyediakan kembali dukungan untuk sekitar 90 persen aset yang terdampak pencurian.

Namun, angka tersebut bukan berarti perusahaan berhasil merebut kembali 90 persen dana yang dicuri dari tangan peretas.

Binance melakukan penggantian dan penambahan aset menggunakan sejumlah sumber dana perusahaan.

Binance juga berkomitmen membeli aset token yang masih belum tercukupi melalui pasar terbuka maupun transaksi langsung (over-the-counter/OTC) hingga seluruh aset yang terdampak kembali memiliki dukungan 100 persen.

"Binance akan menanggung dampak finansial dari dana yang dicuri ini, bukan pengguna kami," demikian pernyataan perusahaan, dikutip dari CNBC International, Senin 2 November 2026.

Binance menjelaskan, aset Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD, dan Zcash …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MAKI Soroti Rencana Dinas Nusron Wahid ke Jepang

Oleh Redaksi · 3 Nov, 10.06 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH – Dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan.

Kali ini, rencana perjalanan dinasnya ke Jepang dipersoalkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang menduga agenda ke luar negeri tersebut berpotensi menjadi alasan untuk kembali menghindari pemeriksaan penyidik.

Boyamin mengungkapkan, informasi rencana perjalanan dinas Nusron ke Jepang diperolehnya setelah mengetahui adanya pengajuan anggaran perjalanan tersebut pada pekan lalu.

"Izin kan saya mengabarkan bahwa Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang. Dari mana ini didapat? Karena Minggu kemarin sejak diajukan anggaran untuk dinas Pak Nusron Wahid ke Jepang," kata Boyamin, Senin (2/11/2026).

Menurut Boyamin, rencana perjalanan tersebut patut dicermati karena muncul ketika Nusron belum memenuhi dua panggilan pemeriksaan KPK. Ia menduga agenda ke luar negeri itu berpotensi dipersiapkan sebagai alasan apabila sewaktu-waktu penyidik kembali memanggil Nusron.

"Bepergian ke luar negeri ini dipakai cadangan kalau sewaktu-waktu dipanggil KPK. Maka, potensi beliau mangkir lagi sehingga ada alasan dinas ke luar negeri," ujarnya.

Boyamin juga mengingatkan bahwa sebelumnya Nusron tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dengan alasan menjalankan tugas dinas ke Johor Bahru, Malaysia. Namun, menurut Boyamin, perjalanan tersebut justru dilakukan melalui Singapura.

Ia khawatir pola serupa kembali terjadi apabila KPK menjadwalkan pemeriksaan berikutnya.

"Nanti sewaktu-waktu dipanggil KPK lagi, maka dengan alasan sedang berdinas ke luar negeri. Ke luar negerinya kapan? Nampaknya kalau nanti, cadangan, kalau ada panggilan," tuturnya.

Boyamin menilai, rencana perjalanan ke Jepang perlu menjadi perhatian agar agenda dinas tidak menjadi alasan berulang yang berpotensi menghambat proses pemeriksaan.

KPK Dinilai Terlalu Lunak

Sorotan Boyamin tidak hanya tertuju kepada Nusron. Ia juga mempertanyakan sikap KPK yang dinilai belum mengambil langkah tegas setelah dua kali ketidakhadiran menteri tersebut.

Menurutnya, penyidik semestinya tidak membiarkan proses pemeriksaan berlarut-larut tanpa kepastian tindak lanjut. Boyamin bahkan menyayangkan belum adanya langkah pemanggilan paksa terhadap Nusron.

"Yang disayangkan sebenarnya KPK dengan tidak tegas memanggil paksa, maka kemudian menjadi berlarut-larut," tegasnya.

Ia mengingatkan, lambannya proses pemeriksaan berpotensi berdampak terhadap penanganan perkara secara keseluruhan.

Terlebih, masa penahanan tersangka lain yang berkaitan dengan kasus tersebut terus berjalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dua Jenderal Polri Diduga Terlibat Penyadapan Presiden, Nama Listyo hingga Ahrie Sonta Disebut

Oleh Redaksi · 3 Nov, 15.01 WIB

Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret nama petinggi Polri kini tengah menjadi sorotan publik.

BANDA ACEH – Divisi Propam Mabes Polri mengamankan sejumlah jenderal, termasuk seorang perwira tinggi berpangkat bintang empat berinisial L, pada Selasa (3/11/2026).

Pemeriksaan internal rahasia tersebut dilakukan untuk memverifikasi persoalan sensitif demi menjaga stabilitas organisasi kepolisian

Operasi senyap itu berlangsung satu bulan setelah Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sejak hari pertama memegang tongkat komando, Jenderal Suyudi telah menegaskan bahwa langkah awalnya adalah menggelar konsolidasi internal secara menyeluruh guna menakar kesinambungan program korps.

”Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujar Suyudi seusai dilantik.

Di tengah upaya merapatkan barisan, ia menekankan orientasi Korps Bhayangkara untuk memulihkan kepercayaan publik lewat pendekatan yang humanis dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

”Kemudian juga penegakan hukum yang adil, dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” kata dia.

Sumber senator menyebutkan Kepala Staff Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi ditangkap divisi propam Mabes Polri. Empat jenderal itu disebut-sebut diketahui melakukan penyadapan kepada Presiden Prabowo.

”Listyo sigit dan 3 jendral ditangkap. Ketauan nyadap Prabowo. Listyo Sudah dipulangkan barusan.,” kata sumber kepada senator

”Mereka yang ditangkap: Irjen Pol. Ahrie Sonta – Kadivkum Mabes Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso – Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri dan terakhir Kombes Pol. Ferly Hediyat,” kata sumber.

ACEH

Dukung Ketahanan Pangan, Satgas TMMD Kodim Tanam Jagung Bersama Warga di Aceh Tenggara

Oleh Redaksi · 2 Nov, 19.38 WIB

BANDA ACEH, KUTACANE – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di wilayah pedesaan, Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0108/Aceh Tenggara bersama masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lahan ketahanan pangan program TMMD, Desa Lawe Kulok, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu (1/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi TNI melalui program TMMD dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di bidang pertanian.

Pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung diharapkan dapat menjadi langkah produktif dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia sekaligus mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Dengan penuh semangat kebersamaan, personel Satgas TMMD bersama warga turun langsung ke lahan pertanian untuk melaksanakan proses penanaman jagung. Kegiatan dilakukan secara gotong royong sebagai bentuk kepedulian bersama dalam mengembangkan sektor pertanian serta menciptakan peluang peningkatan hasil produksi pangan di wilayah tersebut.

Selaku Koordinator Lapangan, Serna Andi menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari upaya Satgas TMMD ke-130 Kodim 0108/Agara dalam mendorong masyarakat agar lebih produktif dan mampu memanfaatkan potensi lahan pertanian yang ada di lingkungan desa.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menunjang ketahanan pangan serta menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan secara optimal melalui kegiatan pertanian produktif perlu terus didorong agar dapat memberikan hasil dan manfaat dalam jangka panjang.

“Kami berharap melalui kegiatan penanaman jagung ini, lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan nantinya menghasilkan komoditas pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi warga untuk terus mengembangkan potensi pertanian lokal sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan,” ujar Serna Andi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Ajak Lansia Tetap Semangat, Sehat, dan Produktif di Usia Senja

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.33 WIB

SABANG – Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengajak masyarakat lanjut usia untuk tetap menjaga semangat hidup, kesehatan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Bertambahnya usia hendaknya tidak menjadi penghalang untuk terus menjalani kehidupan secara positif, produktif, dan penuh rasa syukur.

Ajakan tersebut disampaikan Zulkifli saat membuka Seminar dan Motivasi Bagi Warga Lanjut Usia Tahun 2026 Kota Sabang yang diinisiasi oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), di Aula Sekretariat TP-PKK Kota Sabang, Senin (2/11).

Kegiatan mengusung tema “Menua dengan Bahagia, Tetap Sehat dan Produktif” dan diikuti 54 peserta yang merupakan perwakilan dari setiap gampong di Kota Sabang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Nuri Farisal selaku Penasehat BKMT Kota Sabang.

Untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada peserta, seminar ini menghadirkan tiga narasumber dari bidang kesehatan dan psikologi, yakni dr. Edi Suharto, dokter spesialis THT dr. Rizki Rahmawan, serta psikolog Erna Fefilinda.

Selain mendapatkan edukasi mengenai kesehatan dan pendampingan psikologis dalam menjalani masa lanjut usia, peserta juga difasilitasi pemeriksaan THT secara gratis.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli yang juga merupakan Pembina BKMT Kota Sabang mengingatkan bahwa usia yang semakin bertambah harus diiringi dengan semangat untuk terus melakukan kebaikan dan memperbanyak amal ibadah.

Ia mengajak para peserta agar tidak larut dalam beban pikiran, melainkan menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga kesehatan, serta memanfaatkan waktu yang diberikan Allah SWT untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Keanehan Ijazah SMP Gibran: Kepala Sekolahnya Justru di SMP 9 Surakarta

Oleh Redaksi · 3 Nov, 12.23 WIB

Foto ijazah yang beredar dan dibahas di platform X (Twitter), dokumen SLTP Negeri 1 Surakarta atas nama Gibran Rakabuming Raka ditandatangani oleh Dra. Hj. Sri Harini (NIP 130242969) selaku Kepala Sekolah, tertanggal 21 Juni 2002. FOTO/X.

BANDA ACEH - Polemik terkait keabsahan ijazah SMP Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di media sosial.

Kali ini sorotan tertuju pada nama penandatangan dokumen tersebut.

Berdasarkan foto ijazah yang beredar dan dibahas di platform X (Twitter), dokumen SLTP Negeri 1 Surakarta atas nama Gibran Rakabuming Raka ditandatangani oleh Dra. Hj. Sri Harini (NIP 130242969) selaku Kepala Sekolah, tertanggal 21 Juni 2002.

Namun, sejumlah unggahan dan penelusuran netizen menyebut bahwa Dra. Hj. Sri Harini pada tahun 2002 justru menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Surakarta, bukan SMP Negeri 1 Surakarta.

Data yang dikutip dari buku panduan atau arsip sekolah SMPN 9 Surakarta menyebutkan masa jabatan beliau di sekolah tersebut berlangsung dari 2002 hingga 2005.

Beberapa sumber akademik (termasuk tesis) juga mencantumkan nama yang sama dalam daftar kepala sekolah SMPN 9 Surakarta periode tersebut.

Klaim ini memunculkan pertanyaan: apakah orang yang sama merangkap jabatan, terjadi kesalahan administratif, atau terdapat ketidaksesuaian pada dokumen.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SMP Negeri 1 Surakarta mengenai identitas dan penempatan Dra. Hj. Sri Harini pada tahun 2002.

Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 1 Surakarta saat ini, Wuryanti, telah berulang kali menegaskan bahwa Gibran merupakan alumni resmi sekolah tersebut dan lulus pada 2002.

Ia juga menyatakan bahwa ijazah, buku nilai, dan buku induk Gibran masih tersimpan di sekolah.

Konfirmasi serupa sebelumnya juga disampaikan oleh pihak sekolah dalam menanggapi keraguan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak, termasuk Dokter Tifa.

https://www.twitter.com/blank0-429/status/2117381344938618900

Polemik ijazah Gibran sendiri telah berlangsung cukup lama. Selain jenjang SMP, isu terkait kesetaraan pendidikan menengah atas (SMA) di luar negeri juga sempat menjadi sorotan di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan. Pihak kuasa hukum Gibran sebelumnya menunjukkan salinan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 untuk membantah berbagai klaim.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait kesesuaian nama kepala sekolah pada ijazah tahun 2002 tersebut. Netizen terus meminta klarifikasi agar polemik tidak terus berlarut-larut.

NASIONAL

Geger! Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Bintang Empat Diduga Berinisial L Diperiksa Lalu Dilepas

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.31 WIB

Sebuah siluet hitam menampilkan seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang mengenakan topi dinas lengkap dengan tiga bintang emas. Topi tersebut memiliki detail ornamen

BANDA ACEH – Kabar mengejutkan mengguncang internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sejumlah jenderal dikabarkan sempat diamankan dalam operasi pengamanan internal yang disebut melibatkan satuan khusus Brimob.

Salah satu figur yang terseret dalam kabar tersebut disebut berpangkat jenderal bintang empat dan kini menduduki jabatan sipil strategis di pemerintahan.

Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com lalu dikutip HARIANACEH.co.id menyebutkan, pengamanan itu melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, mulai dari jenderal bintang tiga hingga seorang jenderal bintang empat berinisial L.

Para petinggi kepolisian tersebut dikabarkan dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Namun, perkembangan terbaru menyebutkan jenderal bintang empat berinisial L telah dilepaskan.

Sementara itu, sejumlah jenderal bintang tiga disebut turut menjalani proses pemeriksaan.

"Satu bintang empat inisial L, dan beberapa jenderal bintang tiga. Bintang empat sudah dilepas," katanya.

Kabar tersebut langsung memantik perhatian, mengingat sosok yang disebut berinisial L bukan figur sembarangan.

Ia dikabarkan pernah menduduki jabatan strategis di tubuh Polri sebelum dipercaya mengemban amanah di lingkungan pemerintahan.

Pemeriksaan yang disebut berlangsung maraton itu dikabarkan berkaitan dengan persoalan sensitif internal korps Bhayangkara.

Namun, sumber belum mengungkap secara rinci perkara yang tengah diverifikasi maupun identitas para jenderal yang diperiksa.

"Ada beberapa hal yang ingin diverifikasi. Soal keamanan tentunya," ujar sumber tersebut.

Hingga kini, informasi mengenai pengamanan sejumlah jenderal itu masih bertumpu pada keterangan sumber.

Belum ada penjelasan resmi yang mengungkap secara lengkap identitas para perwira tinggi, duduk perkara, maupun hasil pemeriksaan.

ACEH

Buka Jambore Kader PKK Aceh Jaya, Kak Na: Kader Aktif, Masyarakat Berjaya

Oleh Redaksi · 2 Nov, 13.35 WIB

ACEH JAYA – Kader PKK memiliki tugas yang tidak mudah, harus memiliki kepedulian sosial tinggi serta harus selalu aktif turun menemui warga.

Bakti dan aktifnya kader menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat yang berjaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, dalam sambutannya sebelum membuka Jambore Kader PKK Kabupaten Aceh Jaya, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya, Senin (2/11/2026).

“Selamat mengikuti Jambore buat para kader. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana mempererat ukhuwah, memperkuat koordinasi. Teruslah aktif berbakti pada masyarakat agar masyarakat kita semakin berdaya dan berjaya,” ujar Kak Na.

Pada kesempatan tersebut, istri Gubernur Aceh itu juga mengingatkan para kader untuk terus menjalankan 10 Program Pokok PKK serta bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kebijakan di daerah serta mempelajari, memahami dan menjalankan 6 Standar Pelayanan Minimal Posyandu.

“Teruslah berbuat yang terbaik untuk masyarakat serta mengaplikasikan 6 SPM Posyandu. Terus perkut koordinasi lintas sektor dan instansi agar 6 SPM Posyandu benar-benar dipahami masyarakat dan berjalan maksimal” imbau Kak Na.

Dalam arahannya, Kak Na juga mengingatkan para kader untuk terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan Tuberculossis di daerah masing-masing.

Dengan gerak bersama, Kak Na meyakini upaya penanganan dan pencegahan TB di Aceh akan berjalan maksimal.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Aceh Jaya Desi Maulidar, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran dan kesediaan Ketua TP PKK Aceh untuk membuka Jambore Kader PKK Aceh Jaya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Oleh Redaksi · 3 Nov, 07.54 WIB

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum dinilai dapat menjadi momentum baru dalam dinamika Politik nasional.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, pihak-pihak yang menginginkan pemakzulan Gibran harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Menurut Amir, putusan MA tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengkaji seluruh konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana dalam proses penerbitan surat keterangan tersebut.

"Ketidakabsahan ini juga harus ditelusuri dari sisi pidana. Persoalan tersebut perlu dikaji apakah memenuhi unsur yang dapat menjadi dasar dalam proses pemakzulan Wapres," kata Amir, dikutip Selasa 3 November 2026.

Sebagaimana diketahui, MA dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Putusan tersebut menjadi perhatian politik nasional, terutama setelah PDIP dan PKS mulai memperlihatkan langkah politik terkait penggunaan Hak Angket DPR untuk menindaklanjuti persoalan administrasi pendidikan Gibran.

Amir melihat gerak politik PDIP dan PKS dalam beberapa hari terakhir sebagai perkembangan penting.

Ia menilai, situasi ini sekaligus menjadi kesempatan bagi PDIP untuk melakukan perbaikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, PDIP perlu membaca persoalan Gibran bukan hanya sebagai masalah administrasi pencalonan Wakil Presiden, melainkan juga bagian dari evaluasi terhadap perjalanan politik selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo.

"Ini kesempatan bagi PDIP untuk melakukan perbaikan. Masalah Gibran tidak bisa dilepaskan dari 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selama itu Jokowi merupakan petugas partai PDIP, tetapi kemudian muncul persoalan politik yang membawa dampak besar terhadap hubungan keduanya," kata Amir.

Amir menilai PDIP harus membangun panggung politik baru.

Partai berlambang banteng tersebut perlu menunjukkan keberpihakan terhadap konstitusi dan aspirasi masyarakat.

"Ini momentum untuk membangun agenda politik baru," pungkas Amir.

NASIONAL

DPR Harus Tindaklanjuti Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran, Tapi….

Oleh Redaksi · 3 Nov, 13.09 WIB

BANDA ACEH -Putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 tentang gugatan syarat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menimbulkan gejolak Politik di tanah air.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai bahwa Suket ijazah Gibran harus segera ditindaklanjuti DPR selaku pembuat undang-undang.

"Itu agar permasalahan ijazah dalam pencalonan capres, cawapres tidak terulang kembali di kemudian hari dan harus diturunkan secara detail aturannya," kata Hasyibulloh kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Lanjut dia, DPR juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam merespons hal tersebut.

"Itu agar tidak terjadi kekacauan secara politik apalagi nantinya membuat pergolakan di masyarakat dan berdampak pada stabilitas politik serta sistem demokrasi yang telah dibangun selama 28 tahun," jelas Pengamat Politik jebolan IISIP Jakarta tersebut.

Pastinya dengan adanya gejolak politik soal Gibran, krisis sosial dan ekonomi bakal terbuka lebar di permukaan.

Kini, DPR RI dalam hal ini partai politik didesak mengambil langkah yang paling santer, yakni Hak Angket. Hampir politisi di semua fraksi sudah bersuara. Selanjutnya tinggal bagaimana para pimpinan parpol menyikapi hal tersebut.

Syarat pengajuan Hak Angket DPR RI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (khususnya Pasal 199). Hak angket cukup diusulkan 25 orang anggota DPR RI dengan setidaknya dua fraksi partai politik.

NASIONAL

Pergantian Wapres Berpotensi Picu Perpecahan Koalisi Prabowo

Oleh Redaksi · 3 Nov, 09.45 WIB

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat memberikan pernyataan di depan awak media.

BANDA ACEH - Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan perkara mudah meski polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah membuka ruang bagi proses Politik dan ketatanegaraan untuk menindaklanjutinya.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, menilai pergantian Wapres membutuhkan konsensus politik yang rumit karena menyangkut keseimbangan kekuasaan di dalam koalisi pemerintahan.

Menurutnya, jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa tindak lanjut, polemik mengenai posisi Gibran berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena dengan dua keputusan itu Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres. Kalau itu dibiarkan, isu ini akan terus jadi beban negara dan beban politik Pemerintahan Prabowo," ujar Henri, Selasa, 3 November 2026.

Meski demikian, Henri mengingatkan bahwa proses pergantian Wapres tidak bisa dilakukan secara sederhana.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, kewenangan mengusulkan calon berada di tangan Prabowo.

Namun, menentukan dua nama yang dapat diterima mayoritas anggota MPR, yang didominasi koalisi pendukung pemerintah, bukan perkara mudah.

"Jika tak hati-hati bisa terjadi turbulensi politik, perpecahan koalisi, atau friksi di parlemen," kata Henri.

MA sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

NASIONAL

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Oleh Redaksi · 3 Nov, 07.58 WIB

Presiden ke-7 Joko Widodo tampil mengenakan atribut PSI saat memberikan pidato di hadapan publik. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke DPR pada Pemilu 2029 sulit diwujudkan.

Demikian penegasan analis Politik Saiful Huda Ems, dikutip Selasa 3 November 2026.

"PSI menurut saya tidak akan bisa jadi partai besar, paling tidak dalam Pemilu 2029 nanti," kata Saiful.

Menurut Saiful, PSI sulit menjadi partai besar karena hampir tidak ada satu pun kadernya yang memiliki pengalaman panjang mengelola partai politik besar.

"Apalagi ketua umumnya, Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Jokowi itu masih bocil dan tidak pernah berpengalaman memimpin partai politik," kata Saiful.

Di sisi lain, kata Saiful, meski ada beberapa politisi yang melompat ke PSI, namun tetap saja mendongkrak suara partai dengan lambang gajah tersebut.

"Karena mereka rata-rata merupakan figur yang sangat tidak dikenal dan tidak memiliki track record sebagai politisi atau aktivis ulung," kata Saiful.

Selain itu, meski dalam dua gelaran pemilu, PSI sangat gencar membuat pamflet, baliho, stiker, kaos, jaket, bendera dan alat-alat peraga kampanye lainnya yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia, namun hasilnya nihil.

"PSI tetap menjadi partai gurem di Pemilu 2019 dan 2024," kata Saiful.

NASIONAL

Analis Politik: Jokowi cuma Jago Pencitraan, Tak Lihai Berpolitik

Oleh Redaksi · 3 Nov, 08.02 WIB

Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan sambutan dalam sebuah acara publik. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki target lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 berpotensi besar jadi mimpi di siang bolong.

"Jokowi tidak pernah terlibat dalam urusan mengurus partai Politik. Ketika Jokowi menjadi kader PDIP, dia hanya menjadi "wayang", meskipun akhirnya ia mau nekat menjadi "dalang", namun kemudian ia malah terpental," kata analis politik Saiful Huda Ems, dikutip Selasa 3 November 2026.

Saiful menilai sesungguhnya Jokowi tidak mempunyai kelihaian dalam berpolitik. Menurutnya, Jokowi hanya lihai dalam urusan ilmu perkeliruan alias jago menipu dan memiliki jiwa yang sangat kental sebagai pengkhianat.

"Anggapan Jokowi maestro politik Indonesia juga salah besar," kata Saiful.

Selama ini, kata Saiful, Jokowi tidak pernah berkeringat dan tidak mempunyai konsep apapun untuk mengelola negara.

Jokowi selama ini hanya bermodal keahlian pencitraan, dan semacam menerima barang jadi (konsep atau platform kerja) yang disodorkan oleh para pemikir-pemikir brilian di PDIP dan dari kalangan akademisi non partai.

"Jadi kalau Jokowi bilang PSI akan menjadi partai besar, hanyalah sebuah mimpi seorang megaloman yang kemaruk kekuasaan," kata Saiful.

ACEH

3 BERITA

ACEH

Perluas Akses Layanan, BBPOM Aceh Jalin Kerja Sama Penyelenggaraan MPP Sabang

Oleh Redaksi · 3 Nov, 20.56 WIB

SABANG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperluas akses pelayanan publik agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang dan sejumlah instansi vertikal lainnya, di Gedung MPP Kota Sabang, Senin (2/11/2026).

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, bersama BBPOM Aceh dan perwakilan instansi terkait. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, efektif, dan efisien bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi vertikal yang telah bergabung dan berkomitmen memberikan pelayanan melalui MPP Kota Sabang. Ia berharap kehadiran berbagai layanan dalam satu lokasi dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi, perizinan, maupun memperoleh layanan publik lainnya.

"Dengan terintegrasinya layanan dari berbagai instansi di MPP Kota Sabang, tentunya akan memudahkan masyarakat Kota Sabang dan pengunjung yang datang untuk memperoleh pelayanan publik tanpa harus mendatangi banyak tempat," ujar Zulkifli.

Bergabungnya BBPOM Aceh dalam penyelenggaraan MPP Kota Sabang menjadi langkah penting untuk mendekatkan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mengurangi kendala jarak dan waktu bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang sebelumnya harus menempuh perjalanan ke Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait obat dan makanan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kemudahan akses pelayanan, BBPOM Aceh menghadirkan perangkat ATM BPOM (Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM) di MPP Kota Sabang. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan konsultasi, serta menyampaikan pengaduan terkait obat dan makanan dengan lebih mudah, cepat, dan hemat biaya.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk mengakses layanan BBPOM Aceh tanpa harus datang langsung ke kantor di Banda Aceh. Kehadiran ATM BPOM juga menjadi bagian dari upaya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua Tim Pelayanan Publik BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, menyampaikan bahwa Kota Sabang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata yang dapat menjadi pintu promosi produk UMKM lokal …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Afdhal Khalilullah Kembali Dipercaya Pimpin Kwarcab Pramuka Banda Aceh

Oleh Redaksi · 3 Nov, 19.10 WIB

Momen khidmat penyerahan bendera organisasi dalam sebuah acara resmi kepramukaan.

BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Banda Aceh Periode 2026-2031.

Kepastian tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Banda Aceh yang digelar di Aula Balee Keurukon, Komplek Balai Kota, Selasa (3/11/2026). Peserta muscab secara aklamasi mendukung Afdhal sebagai ketua terpilih.

Muscab Pramuka Banda Aceh tahun ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Mabicab, Kwarda Aceh, para pejabat pemerintah kota, pengurus Kwarcab, DKC, serta seluruh Ketua Kwaran Gerakan Pramuka se-Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Afdhal mengucapkan syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh seluruh Kwartir Ranting dan peserta Muscab. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan estafet pembinaan karakter kaum muda di Banda Aceh.

"Bersama-sama kita telah mengukir banyak prestasi, mulai dari lahirnya puluhan Pramuka Garuda, konsistensi sebagai juara umum Musabaqah Tunas Ramadan, hingga kiprah di tingkat nasional. Capaian ini harus kita tingkatkan dan sempurnakan bersama," ujar Afdhal.

Untuk periode 2026-2031, Afdhal mengusung Visi Berkolaborasi Membangun Pramuka Kota Banda Aceh yang Bertaqwa, Berkarakter, Kreatif dan Inovatif dengan 6 misi utama, meliputi penguatan IMTAQ dan IMTEK, hingga pembinaan karakter dan life skill.

Kemudian pembentukan kader bangsa yang berjiwa Pancasila dan siap Bela Negara, kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan dan lingkungan, memperkokoh eksistensi organisasi, serta menjalin kerjasama lintas organisasi hingga tingkat internasional.

"Mari kita jadikan Muscab ini momentum persatuan untuk melahirkan tunas-tunas bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi Syariat Islam di bumi Banda Aceh tercinta," ujar Afdhal.[]

ACEH

Respon Permintaan Wali Nanggroe, MA Siapkan Naskah Akademik Pendirian Peradilan Niaga Syariah di Aceh

Oleh Redaksi · 3 Nov, 19.31 WIB

BANDA ACEH – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara resmi merespons positif usulan Lembaga Wali Nanggroe untuk mendirikan Peradilan Niaga Syariah (Commercial Sharia Court) di Serambi Mekkah. Sebagai langkah konkret, MA saat ini tengah merampungkan penyusunan Naskah Akademik dan draf rancangan undang-undang terkait regulasi tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Zulfikar Idris menyebutkan kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Kamar Agama MA RI Yasardin saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Senin (2/11/2026) malam.

"Kedatangan saya hari ini adalah untuk menginformasikan kepada Yang Mulia Paduka Wali Nanggroe Aceh mengenai tindak lanjut dari surat beliau terkait rencana pendirian Peradilan Niaga Syariah. Karena pembentukannya harus melalui undang-undang, Mahkamah Agung saat ini telah menyusun Naskah Akademik dan draft rancangannya," ujar Yasardin di sela-sela jamuan makan malam.

Yasardin menjelaskan bahwa karena pembentukan peradilan khusus ini membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang, MA telah bergerak menggalang dukungan lintas sektoral. Sosialisasi intensif kini tengah dilakukan ke berbagai instansi pembuat kebijakan, mulai dari Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dalam cetak birunya, Peradilan Niaga Syariah ini tidak hanya didirikan di Aceh, melainkan di beberapa titik strategis nasional yang menjadi pusat ekonomi syariah Indonesia.

"Rencananya, Peradilan Niaga Syariah ini akan didirikan di beberapa titik strategis Indonesia, termasuk Aceh, Jakarta, Semarang, dan Makassar," tambah Yasardin.

Wali Nanggroe menyatakan rasa optimisme dan apresiasi yang tinggi atas komitmen penegak hukum tertinggi di Indonesia tersebut dalam memperkuat ekosistem hukum Islam di daerah.

"Saya sangat berbesar hati dan senang sekali atas kedatangan Yang Mulia Bapak Dr. Yasardin beserta rombongan dari Jakarta. Ini merupakan respon yang sangat baik atas usulan kita. Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh merupakan lokasi yang paling tepat dan relevan untuk pembentukan Peradilan Niaga Syariah ini," ungkap Wali Nanggroe.

Hadirnya Peradilan Niaga Syariah ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan penegakan hukum dalam sengketa bisnis, perbankan, dan industri halal yang pertumbuhannya kian pesat di Aceh dan nasional.

Pada pertemuan itu turut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Zulkifli Yus beserta jajaran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

4 BERITA

EDUKASI

Olah Daun Kari Jadi Bumbu Tabur Instan, Tim PPG USK Raih Juara II Terbaik Gelar Karya Projek Kepemimpinan

Oleh Hamdani · 3 Nov, 21.42 WIB

Tim Seni Budaya dan Kuliner PPG USK mempresentasikan inovasi pengolahan daun kari menjadi bumbu tabur instan yang berhasil meraih Juara II Terbaik dari 12 tim peserta Gelar Karya Projek Kepemimpinan PPG USK

BANDA ACEH – Inovasi pengolahan daun kari menjadi bumbu tabur instan mengantarkan Tim Seni Budaya dan Kuliner Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Syiah Kuala (USK) meraih Juara II Terbaik dalam Gelar Karya Projek Kepemimpinan PPG USK, Senin (2/11/2026).

Tim tersebut berhasil meraih posisi kedua terbaik dari 12 tim peserta melalui proyek bertajuk "Inovasi Pengolahan Daun Kari Menjadi Bumbu Tabur Instan, Praktis dan Bernilai Ekonomis". Hasil karya itu dipamerkan di Lantai 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USK, Banda Aceh.

Inovasi ini berangkat dari upaya mengoptimalkan potensi bahan lokal, khususnya daun kari yang selama ini lebih dikenal sebagai bahan pelengkap masakan tradisional. Melalui proses pengolahan dan pengembangan produk, daun kari diolah menjadi bumbu tabur instan yang praktis, memiliki cita rasa khas, serta berpotensi menjadi alternatif penyedap dan pelengkap berbagai jenis makanan.

Tidak hanya berorientasi pada pengembangan produk, proyek ini juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan demonstrasi pengolahan daun kari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 26 September 2026 dengan melibatkan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tanjong Deah, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam kegiatan itu, tim memperkenalkan potensi daun kari sebagai bahan baku inovasi kuliner sekaligus memperagakan tahapan pengolahannya menjadi bumbu tabur instan. Antusiasme peserta terlihat dari ketertarikan mereka terhadap proses pembuatan dan peluang pemanfaatan bahan lokal yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Respons positif masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa inovasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain memberikan alternatif pemanfaatan bahan pangan lokal, produk ini juga membuka peluang usaha baru yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Ketua PPG Universitas Syiah Kuala, Drs. Abu Bakar, M.Si., berharap inovasi bumbu tabur instan berbahan daun kari tersebut tidak berhenti pada kegiatan gelar karya. Menurutnya, produk ini perlu terus dikembangkan, terutama dari sisi kualitas, kemasan, standardisasi produksi, dan strategi pemasaran agar mampu bersaing serta berpeluang menjadi produk unggulan berbasis kearifan lokal.

Ia juga berharap pengalaman dalam proyek tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa PPG untuk membangun jiwa kepemimpinan, kreativitas, kemampuan bekerja sama, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Senada dengan itu, pembimbing proyek, Laili Suhairi, S.Pd., M.Si., menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi, baik dalam peningkatan kualitas produk maupun pemanfaatannya di tengah …

EDUKASI

Wakil Bupati Aceh Barat: Miconis 2026, Perkuat Kajian Islam di Era Digital

Oleh Aceh Barat · 3 Nov, 16.43 WIB

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil dengan seragam dinas cokelat dan selempang khusus sedang berbicara di podium pada sebuah acara resmi. Di sebelahnya terdapat spanduk besar

MEULABOH - Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil membuka Third Meulaboh International Conference on Islamic Studies (Miconis) 2026 di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Selasa (3/11/2026).

Said mengatakan, tema Miconis 2026, Islamic Studies for Global Transformation: Knowledge, Justice, Sustainability, and Digital Civilization, relevan dengan tantangan era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, transformasi digital menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Namun, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan inovasi.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah," kata Said.

Ia menegaskan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus tetap berlandaskan nilai-nilai agama. Di Aceh Barat, pembangunan perlu berjalan seiring dengan penguatan syariat Islam, pembentukan akhlak, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Said berharap Miconis 2026 menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, dan pembangunan daerah.

Ia juga mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pihak agar hasil konferensi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata.

Said berharap STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terus berkembang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian keislaman yang berkontribusi bagi kemajuan Aceh Barat, Aceh, dan Indonesia.[]

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Incar Kursi PTN Tanpa Tes? Ini Perkiraan Jadwal SNBP 2027 dan Tahapan yang Harus Disiapkan

Oleh Van · 3 Nov, 16.09 WIB

Suasana serius siswa saat berkonsentrasi penuh mengerjakan ujian di ruang kelas.

JAKARTA - Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2027 menjadi salah satu jalur yang perlu dipersiapkan siswa kelas 12 SMA, SMK, dan sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Berbeda dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang mempertimbangkan prestasi akademik dan ketentuan seleksi yang berlaku.

Dilansir dari laman snbpmb pada Selasa, (3/11/2026) SNBP 2027 diprediksi berlangsung pada Februari 2027.

Artinya, tanggal yang beredar saat ini masih perlu menunggu pengumuman resmi dari panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Sebagai gambaran, siswa dapat mempelajari tahapan pelaksanaan SNBP tahun sebelumnya untuk mempersiapkan diri.

Perkiraan Jadwal SNBP 2027

Ada sejumlah tahapan yang perlu diperhatikan siswa maupun pihak sekolah sebelum pendaftaran SNBP dibuka.

Berikut perkiraan jadwal SNBP 2027 berdasarkan pola pelaksanaan tahun sebelumnya:

• Pengumuman kuota sekolah: diperkirakan akhir Desember 2026.

• Masa sanggah kuota sekolah: diperkirakan akhir Desember 2026 hingga pertengahan Januari 2027.

• Registrasi akun SNPMB sekolah: diperkirakan Januari 2027.

• Pengisian PDSS oleh sekolah: diperkirakan Januari hingga Februari 2027.

• Registrasi akun SNPMB siswa: diperkirakan Januari hingga Februari 2027.

• Pendaftaran SNBP 2027: diperkirakan Februari 2027.

• Pengumuman hasil SNBP: diperkirakan Maret 2027.

• Unduh kartu peserta: diperkirakan Februari hingga April 2027.

Tanggal tersebut bukan jadwal resmi SNBP 2027. Siswa perlu memantau pengumuman melalui laman resmi SNPMB agar tidak keliru menggunakan informasi yang belum ditetapkan panitia.

Sebagai perbandingan, pada SNBP 2026 pengumuman kuota sekolah berlangsung 29 Desember 2025, pendaftaran dibuka 3–18 Februari 2026, sedangkan hasil seleksi diumumkan pada 31 Maret 2026.

Siapa yang Bisa Mendaftar SNBP 2027?

Tidak semua siswa kelas 12 otomatis bisa mengikuti SNBP. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang masuk dalam kategori eligible atau memenuhi kriteria untuk mendaftar.

Penetapan siswa eligible dilakukan oleh sekolah berdasarkan ketentuan SNPMB.

Pemeringkatan umumnya mempertimbangkan nilai rapor seluruh mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 serta prestasi siswa.

Sekolah juga harus memperhatikan kuota berdasarkan akreditasi. Pada ketentuan SNBP 2026, kuota siswa eligible terdiri atas:

• Akreditasi A: maksimal 40 persen siswa terbaik.

• Akreditasi B: maksimal 25 persen siswa terbaik.

• Akreditasi C dan lainnya: maksimal 5 persen siswa terbaik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

FEBI UIN Ar-Raniry Dorong Dosen Integrasikan AI dan Gamifikasi dalam Perkuliahan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 14.25 WIB

Workshop Metode Pembelajaran Inovatif bertema "Mengajar Lebih Hidup: AI, Gamifikasi, dan Teknologi untuk Pembelajaran Ekonomi dan Bisnis Islam" di Ruang Teater FEBI, Selasa

BANDA ACEH – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendorong para dosen untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital melalui penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Workshop Metode Pembelajaran Inovatif bertema "Mengajar Lebih Hidup: AI, Gamifikasi, dan Teknologi untuk Pembelajaran Ekonomi dan Bisnis Islam" di Ruang Teater FEBI, Selasa (3/11/2026).

Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M., saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi.

Karena itu, dosen dituntut tidak hanya menguasai materi perkuliahan, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini.

"Kita tidak cukup hanya menjadi dosen yang menguasai materi; kita juga harus menjadi pendidik yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna," kata Azharsyah.

Menurutnya, tantangan dosen saat ini bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan memastikan mahasiswa benar-benar memahami pengetahuan yang diberikan, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mampu berpikir kritis, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

Ia menilai, pemanfaatan AI dan gamifikasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Namun, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh sekadar mengikuti tren, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas proses belajar-mengajar.

"Teknologi harus menjadi alat yang membantu dosen mengajar lebih efektif dan mahasiswa belajar lebih baik, tanpa mengabaikan etika akademik, validitas informasi, serta nilai-nilai keislaman," ujarnya.

Azharsyah juga menekankan bahwa mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam perlu dibekali kemampuan yang lebih luas, tidak hanya penguasaan teori, tetapi juga kemampuan analitis, kreativitas, kolaborasi, literasi digital, dan integritas yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Karena itu, ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada penambahan wawasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penerapan metode pembelajaran inovatif di ruang-ruang perkuliahan.

"Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti merancang tugas yang lebih interaktif, menggunakan studi kasus yang relevan, memanfaatkan AI secara bertanggung jawab, serta membangun suasana kelas yang mendorong mahasiswa aktif berpikir dan berdiskusi," tambahnya.

Workshop yang diikuti dosen FEBI tersebut menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang keahlian berbeda, yakni Mulkan Fadhli, M.T., dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, serta Jurnalis J Hius, S.T., M.B.A., praktisi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

8 BERITA

INTERNASIONAL

Kisah Tragis Copilot Muda Nathalia Filgueiras di Tragedi Learjet Florida

Oleh Redaksi · 3 Nov, 09.49 WIB

Nathalia Filgueiras, seorang copilot berusia 20 tahun yang menjadi salah satu korban jiwa dalam kecelakaan maut pesawat Learjet 60 di Florida. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Dunia penerbangan berduka atas kepergian Nathalia Filgueiras, seorang copilot berusia 20 tahun yang menjadi salah satu korban jiwa dalam kecelakaan maut pesawat Learjet 60 di Florida.

Insiden tragis yang merenggut nyawa sembilan orang di dalamnya ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga serta kerabat yang ditinggalkan.

Nathalia tumbuh dalam keluarga Brasil di Boca Raton, Florida, dengan kecintaan mendalam terhadap dunia terbang yang terinspirasi dari sang ayah, Allan Filgueiras.

Ayahnya yang juga seorang pilot mengajarkannya menerbangkan pesawat sejak dini hingga ia berhasil mengantongi lisensi pilot saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Melalui akademi penerbangan di sekolahnya, ia mendapatkan dukungan penuh untuk mengejar impian masa kecilnya.

Teman masa kecilnya, Nicole Tarantino, mengenang Nathalia sebagai sosok berdedikasi tinggi yang sangat mencintai dunia penerbangan.

"Dia adalah sosok yang luar biasa baik di dalam maupun luar, dan dia selalu tahu bahwa dirinya ingin menjadi seorang pilot," ujar Tarantino.

Detik-Detik Terakhir yang MencekamBerdasarkan keterangan National Transportation Safety Board (NTSB), pesawat Learjet 60 yang menerbangkan Nathalia sebagai perwira pertama (first officer) bertolak dari Texas menuju Bahama.

Di tengah penerbangan pada ketinggian 35.000 kaki, pesawat sempat melaporkan turbulensi moderat akibat es jernih (clear ice) dan meminta naik ke ketinggian 37.000 kaki.

Hanya berselang 30 detik kemudian, pesawat mendadak turun dengan kecepatan drastis. Rekaman suara kokpit menangkap detik-detik mencekam saat Nathalia memberikan panggilan darurat terakhir sebelum pesawat menabrak tanah.

"Mayday, mayday. Kami turun 10.000 kaki per menit... Kita akan menabrak tanah, 722 Bravo Delta," ujar suara dalam rekaman yang disusul jeritan.

Kecelakaan yang merenggut sembilan nyawa ini—termasuk para penumpang seperti Adam Robinson, Helen Sharp, bersama dua anak mereka Emma dan Charlie, serta Rachael Reed, Charmi Fehr, dan Anita Maria Cetina—kini masih dalam investigasi mendalam oleh pihak NTSB.

Meski kepergiannya begitu mendadak dan memilukan, orang-orang terdekat memilih untuk mengenang semangat serta ketegu-han hati Nathalia dalam mengejar mimpi-mimpi besarnya di angkasa.

KOMUNITAS

Gampong Sentosa Santuni 18 Anak Yatim dan Piatu, Dana Terkumpul Capai Rp84,24 Juta

Oleh Hamdani · 3 Nov, 22.06 WIB

Keuchik Gampong Sentosa, Edy Hendrawan, didampingi Ketua Tuha Peuet Gampong, Marzuki, bersama anak-anak yatim dan piatu penerima santunan dalam rangkaian peringatan Maulid

PIDIE – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap anak yatim dan piatu ditunjukkan masyarakat Gampong Sentosa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan kegiatan santunan, masyarakat berhasil menghimpun dana sebesar Rp84.240.000 untuk membantu 18 anak yatim dan piatu.

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (1/11/2026) di meunasah Gampong Sentosa tersebut dihadiri perangkat gampong, tokoh masyarakat, warga, serta para penerima santunan.

Dana yang terkumpul merupakan hasil partisipasi dan sumbangan berbagai pihak, termasuk kontribusi para diaspora atau warga asal Gampong Sentosa yang kini menetap dan bekerja di berbagai daerah di perantauan.

Setiap anak menerima santunan uang tunai sebesar Rp4.680.000. Selain itu, masing-masing penerima juga mendapatkan paket kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah berupa beras sebanyak 27 kilogram, minyak makan 2 liter, gula 1 kilogram, dua lembar sarung, satu tas sekolah, serta satu papan telur.

Keuchik Gampong Sentosa, Edy Hendrawan, didampingi Ketua Tuha Peuet Gampong, Marzuki, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, dermawan, serta diaspora yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

"Atas nama Pemerintah Gampong Sentosa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, para dermawan, dan diaspora Gampong Sentosa di perantauan yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Berkat kepedulian dan kebersamaan kita semua, kegiatan Maulid dan santunan bagi 18 anak yatim dan piatu ini dapat terlaksana dengan baik serta membawa kebahagiaan bagi mereka," ujar Edy.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kepedulian sosial antarsesama warga, termasuk masyarakat Gampong Sentosa yang berada di perantauan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan tausiah singkat yang disampaikan Tgk. Ibnu Hajar. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Gampong Sentosa bersama masyarakat berharap semangat berbagi, persaudaraan, dan kepedulian terhadap anak yatim dan piatu terus terpelihara sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.[]

KOMUNITAS

Pj Keuchik Pulo Bunta Fasilitasi Tim USM Peroleh Hibah Kemdiktisaintek untuk Gampong Meunasah Tuha

Oleh Hamdani · 3 Nov, 21.54 WIB

Wakil Rektor IV USM, Dr. Jalaluddin, M.Pd., menyampaikan keberhasilan tim kolaborasi USM memperoleh hibah Program Mahasiswa Berdampak – Aksara Peduli Tahun 2026 dari Kemdiktisaintek untuk program pemberdayaan masyarakat Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada

JANTHO - Pj Keuchik Pulo Bunta, Rusydi SAg MPd memfasilitasi Tim Universitas Serambi Mekkah (USM) dalam proses untuk memperoleh dan hibah dari Kemdiktisaintek untuk Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada.

Hal itu disampaikan Rusydi disela penanda tanganan MOA dan IA dengan FKIP, FKM, dan F Teknik USM, Selasa (3/11/2026) di Aula UDKP Kecamatan Peukan Bada.

"Proses untuk mendapatkan dana hibah tersebut sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu bersama dosen FKM USM, Burhanuddin Syam dan alhamdulillah sudah disetunjui oleh Kemendiktisaintek, "kata Rusydi yang juga selaku Sekcam Peukan Bada ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor IV, Dr Jalaluddin MPd menyampaikan kabar baik terkait keberhasilan tim Universitas Serambi Mekkah memperoleh hibah Program Mahasiswa Berdampak – Aksara Peduli Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), melalui program berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kesiapsiagaan Kesehatan Menghadapi Gempa Bumi dan Tsunami melalui Inovasi Edukasi dan Simulasi Berbasis Komunitas di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.”

Program ini merupakan salah satu wujud konkret implementasi kerja sama antara Universitas Serambi Mekkah dan Pemerintah Kecamatan Peukan Bada.

"Kegiatan tersebut diinisiasi oleh tim kolaborasi lintas fakultas yang melibatkan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah bersama Sekcam Peukan Bada, "kata Jalaluddin.

Keberhasilan memperoleh pendanaan hibah tersebut menjadi momentum penting bagi USM untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Melalui Program Mahasiswa Berdampak – Aksara Peduli, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman pembelajaran di luar kampus, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, menerapkan inovasi, dan mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Program ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif dan multi-disiplin yang mengintegrasikan keilmuan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan teknik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan solusi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tingkat gampong.

Pelaksanaan program ini juga menjadi bukti bahwa kerja sama MoA dan IA tidak berhenti pada dokumen kesepakatan, tetapi langsung diarahkan pada kegiatan nyata yang melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah kecamatan, dan kelompok masyarakat sasaran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Nama Musisi Ahmad Dhani Muncul di Sidang Korupsi Bea Cukai, KPK Buka Peluang Periksa

Oleh Redaksi · 3 Nov, 13.18 WIB

Anggota DPR, Ahmad Dhani. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Nama musisi sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Hal itu terjadi saat eks Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo diperiksa sebagai terdakwa pada Senin (2/11/2026).

Bermula dari Jaksa mengulik terkait Bayu pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Ahmad Dhani. Bayu pun mengamininya.

"Kemudian ada yang kami tanyakan, 'Huda, ketika barangnya ditangkap antara Lampung atau Banjarmasin, kemudian saya dihubungi Ahmad Dhani', Ahmad Dhani ini siapa?" tanya Jaksa.

"Pengakuannya sih yang...," jawab Bayu

"Musisi ya? Band?" tanya Jaksa.

"Ya, pengakuannya," respons Bayu.

Orang yang mengaku Ahmad Dhani itu menyebut seseorang bernama Huda yang sedang bermasalah dengan Bea Cukai adalah saudaranya.

"Kemudian Ahmad Dhani menyampaikan 'ini saudara saya, Mas, tolong dibantu-bantu'. Kemudian terdakwa sampaikan, 'kalau benar dibantu'," kata Jaksa membacakan BAP.

Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Jaksa akan menganalisis setiap fakta persidangan yang ada.

Hal itu dia sampaikan terkait peluang KPK memanggil Ahmad Dhani.

"Setiap fakta yang muncul dalam persidangan tentunya akan dianalisis oleh JPU, untuk membantu menerangkan suatu kronologi peristiwa ataupun kontruksi perkaranya di hadapan majelis hakim," ujar Budi saat dihubungi wartawan, Selasa (3/11/2026).

"Termasuk jika nanti Majelis Hakim memerintahkan agar JPU menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, semua terbuka kemungkinan, karena pada prinsipnya keterangan-keterangan saksi nantinya akan memperjelas dalam proses pembuktian perkara di persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, Budiman didakwa menerima gratifikasi berupa Rp 5.278.500.000, 525.000 dollar Singapura, 10.000 dollar Amerika Serikat, 119.755 dollar Singapura, 4.700 dollar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia pada periode September 2024 hingga Januari 2026. Gratifikasi itu diterima Budiman bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.

LINGKUNGAN

Kompolnas Minta Pengaduan Dugaan Perusakan Hutan Aceh Singkil Dilengkapi, Polisi Disorot

Oleh Ahmad Fadhli · 3 Nov, 14.10 WIB

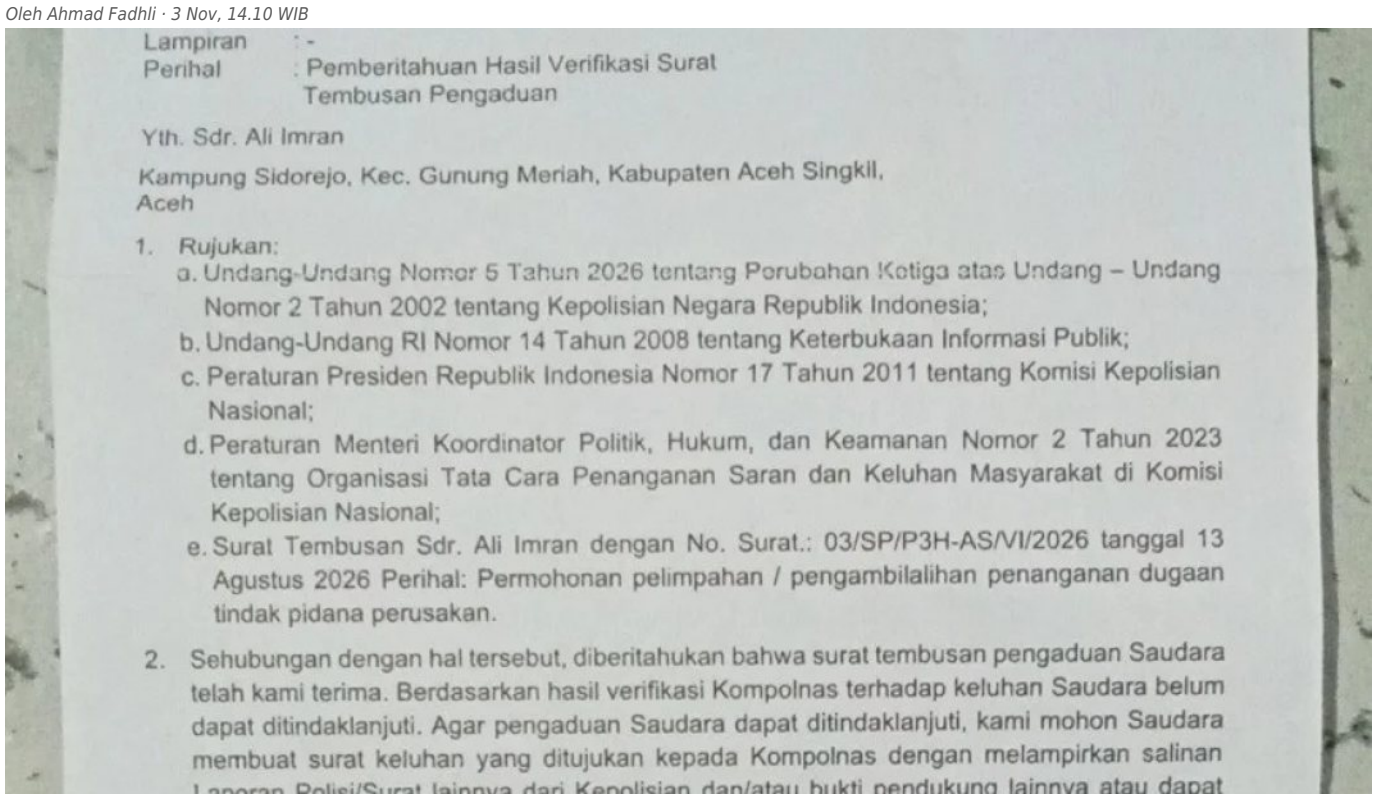

Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi Surat Tembusan Pengaduan

Yth. Sdr. Ali Imran

Kampung Sidorejo, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh

1. Rujukan:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
   d. Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional;
   e. Surat Tembusan Sdr. Ali Imran dengan No. Surat.: 03/SP/P3H-AS/VI/2026 tanggal 13 Agustus 2026 Perihal: Permohonan pelimpahan / pengambilalihan penanganan dugaan tindak pidana perusakan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan bahwa surat tembusan pengaduan Saudara telah kami terima. Berdasarkan hasil verifikasi Kompolnas terhadap keluhan Saudara belum dapat ditindaklanjuti. Agar pengaduan Saudara dapat ditindaklanjuti, kami mohon Saudara membuat surat keluhan yang ditujukan kepada Kompolnas dengan melampirkan salinan Laporan Polisi/Surat lainnya dari Kepolisian dan/atau bukti pendukung lainnya atau dapat

Surat pemberitahuan hasil verifikasi pengaduan dari Kompolnas kepada seorang warga.

ACEH SINGKIL – Perkembangan baru muncul dalam polemik penanganan dugaan tindak pidana perusakan kawasan hutan di Kabupaten Aceh Singkil.

Setelah sebelumnya publik mempertanyakan konsistensi dan lambannya penanganan perkara oleh aparat kepolisian, kini Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI telah menyampaikan surat balasan kepada Ali Imran terkait surat tembusan pengaduan yang dikirimkan pada 13 Agustus 2026.

Surat Kompolnas bernomor B-360/DT.00.01.9/2026, tertanggal 30 September 2026, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Surat Tembusan Pengaduan, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Sekretariat Kompolnas, Joko Purwanto, S.H., S.I.K. Dalam surat tersebut, Kompolnas menyatakan telah menerima surat tembusan dari Ali Imran dengan Nomor 03/SP/P3H-AS/VI/2026 tanggal 13 Agustus 2026.

Surat itu berisi permohonan pelimpahan atau pengambilalihan penanganan dugaan tindak pidana perusakan kawasan hutan yang disertai persoalan kelalaian dalam penanganan perkara oleh Polres Aceh Singkil, yang ditujukan kepada Kapolda Aceh.

Namun, berdasarkan hasil verifikasi, Kompolnas menyampaikan bahwa surat yang diterima masih berupa tembusan pengaduan sehingga belum dapat ditindaklanjuti.

Kompolnas kemudian meminta agar pengaduan disampaikan secara resmi dengan melampirkan salinan laporan polisi, surat-surat lain dari kepolisian, dan/atau bukti pendukung lainnya.

Pengaduan juga dapat disampaikan secara langsung melalui situs resmi Kompolnas.

Surat tersebut sekaligus menjadi petunjuk bagi pelapor mengenai mekanisme penyampaian pengaduan agar dapat diproses sesuai tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kompolnas.

Berawal dari laporan April 2025, baru naik ke tahap penyidikan Agustus 2026

Persoalan ini bermula dari laporan informasi terkait dugaan perambahan dan perusakan kawasan hutan di wilayah Kampung Situbuh-Tubuh dan Blok 18, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.

Laporan informasi tersebut tercatat dengan Nomor LI-01/IV/RES.2.5/2025/Reskrim tanggal 23 April 2025. Sebelumnya, para pelapor mengaku telah berupaya meminta kejelasan perkembangan penanganan perkara kepada Polres Aceh Singkil.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, perkara tersebut akhirnya ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 24 Agustus 2026 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/51/VIII/RES.5.6/2026/-Reskrim.

Peningkatan status ke tahap penyidikan tersebut menjadi perkembangan prosedural penting. Namun, bagi pihak pelapor, hal itu belum serta-merta menjawab berbagai pertanyaan mengenai lambannya penanganan sejak laporan awal disampaikan.

Sebelumnya, persoalan ini juga telah menjadi sorotan pemberitaan media pada 30 Oktober 2026 dengan judul Kasus Hutan Aceh Singkil, Publik Ragukan Konsistensi Aparat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Cepatnya Laju Kereta, Secepat Bertambahnya Utang Negara

Oleh Rut sw · 3 Nov, 09.50 WIB

Logo Whoosh yang melambangkan kecepatan dan kemajuan transportasi di Indonesia.

OLEH bangga sejenak, kereta cepat Whoosh di Indonesia menjadi kereta tercepat di dunia sejak tahun 2023.

Dengan kecepatan 350 km/jam mengalahkan CR400 Fuxing di Tiongkok: 350 km/jam. Sejak Oktober 2023, sudah 3 tahun beroperasi, Whoosh telah melayani 18,2 juta penumpang.

Bangganya Sejenak, Sengsaranya 80 Tahun

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dibiayai dari utang mencapai sekitar Rp116 triliun hingga US$7,27 miliar, dengan mayoritas pinjaman berasal dari China Development Bank (CDB).

Mulai 15 September 2026, pengelolaan kewajiban dan utang proyek Whoosh resmi dialihkan ke Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum PT Sarana Multigria Finansial (SMF) setelah sebelumnya ditangani oleh Danantara dan konsorsium BUMN.

Restrukturisasi dan pengalihan pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Badan Pengelola Investasi (Danantara).

Setelah restrukturisasi, jangka waktu pembayaran (tenor) menjadi 80 tahun, dengan cicilan Rp 1 triliun per tahun (IDNFinancials,9-9-2026).

Ini fakta, bangganya hanya sesaat namun rakyat Indonesia harus menanggung cicilan utang selama 80 tahun, bukan waktu yang sedikit juga bukan jumlah yang sedikit sebab ini utang berbasis riba.

Beban bunga diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp2,12 triliun per tahun tergantung komponen bunga awal dan pinjaman tambahan cost overrun (dengan suku bunga awal sekitar 2 persen–3,3 persen).

Sudah bisa dibayangkan APBN kita semakin " berdarah-darah" menanggung utang yang luar biasa, belum dengan belanja negara untuk beberapa proyek strategis seperti MBG bak anak emas, bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjanjikan insentif hingga RP 1 triliun bagi daerah atau wilayah yang berhasil memajukan MBG.

Dana dari mana, jelas APBN. Pemerintah juga sudah ada wacana menambah jalur kereta cepat ini Jakarta-Surabaya.

Kita harus pahami, proyek raksasa ini bukan sekadar bagian dari pelayanan negara untuk mempermudah rakyatnya bertransportasi, dilihat dari pendeknya jarak yang selama ini masih bisa dilakukan dengan transportasi biasa seperti kereta api dan bus, ditambah dengan tiket yang lumayan mahal, kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah akan berpikir ulang untuk menjadikannya transportasi harian. Pun macet tak pernah terurai dengan adanya kereta cepat Whoosh ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Gibran di Ujung Tanduk 25 Pendekar Senayan Bisa Memulai Serangan

Oleh Redaksi · 3 Nov, 07.48 WIB

Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan resmi dalam sebuah acara kenegaraan.

Oleh: Rosadi Jamani((Wartawan Senior))

ARA-GARA tidak menulis soal ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, saya sempat dicap termul. Soal ijazah sengaja saya nonton saja, karena bola sesungguhnya itu ada di DPR. Sementara wakil rakyat masih reses.

Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal. Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka nomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan 6 Agustus 2019, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga memerintahkan penarikan serta pemusnahannya.

Begitu palu diketuk, kubu Gibran langsung mengeluarkan jurus Tapak Bumi. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan, Gibran tidak akan mundur.

Menurutnya, yang dibatalkan hanya Suket, bukan jabatan Wakil Presiden. Kuasa hukumnya, Muhammad Rullyandi, juga berpendapat putusan itu tidak otomatis menggugurkan kedudukan Gibran.

Relawan Militan Gibran, Andi Azwan, ikut mempertahankan legitimasi pencalonan dengan merujuk Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023.

"Ini seperti daging babi sudah dinyatakan haram, tetapi bisnisnya tetap jalan. Katanya, yang bermasalah dagingnya, bukan omzetnya. Waduh, jurus penalaran macam apa ini, wak!"

Namun, jangan termakan cerita, perkara baru masuk pukul sembilan pagi, hakim dipanggil pukul sebelas, lalu sore langsung diputus.

Faktanya, gugatan diajukan 19 Februari 2026, kasasi dikirim 22 September, diterima MA 23 September, diregistrasi 8 Oktober, dan diputus 30 Oktober. Tidak ada bukti publik tentang instruksi mendadak ataupun suap hakim.

Di gelanggang Politik, PDIP melalui Hasto Kristiyanto mendorong tindak lanjut politik dan membuka komunikasi lintas partai untuk kemungkinan Hak Angket.

PKS melalui Muhammad Kholid juga mendukung langkah konstitusional. Golkar masih menunggu kajian, PKB membangun komunikasi. Sedangkan Demokrat belum menentukan sikap resmi.

Namun, Jansen Sitindaon sudah mengeluarkan suara keras, Gibran sebaiknya mundur atau DPR/MPR memproses pemberhentiannya.

Nah, sekarang muncul angka keramat, 25!

Berdasarkan UU MD3, hak angket dapat diusulkan minimal 25 anggota DPR dari lebih satu fraksi.

Tetapi, usulan itu belum otomatis lolos.

Harus dibawa ke Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari setengah anggota DPR dan disetujui lebih dari setengah anggota hadir.

Dengan 580 kursi, PDIP yang memiliki sekitar 110 kursi tetap membutuhkan kawan seperguruan. Tidak bisa bertarung sendirian.

Kebetulan DPR sedang reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Artinya, 10 November menjadi momentum kembalinya masa persidangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Kursi Wapres Gibran Makin Terancam

Oleh Redaksi · 3 Nov, 08.09 WIB

Gibran Rakabuming Raka tampak mengenakan hiasan kepala tradisional saat berkunjung ke Papua sebagai bentuk penghormatan budaya.

Oleh: Hamdi Putra((Forum Sipil Bersuara - FORSIBER))

IBRAN Rakabuming Raka dahulu diusahakan menjadi pendamping Prabowo Subianto hingga melalui permintaan berulang kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Kini, ketika surat keterangan penyetaraan pendidikannya disengketakan, suara mengenai pengunduran diri dan pemakzulan justru muncul dari elite partai yang ikut mengusungnya.

Perubahan ini menuntut penelusuran terhadap perhitungan sebelum pencalonan: keuntungan apa yang dikejar, risiko apa yang diketahui, dan siapa yang mengambil keputusan?

Dugaan bahwa Gibran dipilih untuk kemudian disingkirkan memang belum terbukti.

Namun, rangkaian pencalonan, kontroversi etik, sengketa penyetaraan, hingga pernyataan elite koalisi menyediakan pijakan untuk menguji dugaan tersebut.

Penelusurannya harus diarahkan kepada pihak yang menyusun strategi dan memeriksa persyaratan sejak awal.

Salah satu orang kuat kepercayaan Prabowo pernah menjelaskan bahwa dirinya bersama sejumlah orang menyusun perhitungan pemilihan Gibran dan menyampaikannya kepada Prabowo.

Pertimbangannya berkaitan dengan peluang kemenangan. Ia juga menyebut Prabowo meminta izin kepada Jokowi sampai lima kali untuk menjadikan Gibran sebagai pendamping.

Pengakuan itu menunjukkan adanya upaya aktif dari lingkaran Prabowo. Gibran dipilih melalui pembahasan, perhitungan, dan pendekatan berulang.

Karena itu, persoalan pencalonannya juga menjadi tanggung jawab Politik pihak yang dahulu mengusahakan pasangan tersebut.

Mereka harus menjelaskan pemeriksaan sebelum pendaftaran. Siapa menilai kelengkapan berkas? Siapa memastikan persyaratan pendidikan terpenuhi? Apakah kemungkinan sengketa pernah dibahas?

Keputusan sebesar pencalonan wakil presiden seharusnya disertai pemeriksaan yang dapat dijelaskan secara terbuka.

Jalan Gibran menuju pencalonan terbuka melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun bagi orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Kedudukan Gibran sebagai Wali Kota Solo membuatnya dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk maju.

Namun, keuntungan hukum itu disertai beban etik. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Persoalan dalam penanganan perkara yang membuka jalan pencalonan Gibran telah memperoleh penegasan resmi sebelum pemungutan suara berlangsung.

Gibran berhasil maju, sementara proses yang membukakan pintu menjadi sumber kritik terhadap kredibilitas pencalonannya. Pasangan memperoleh kesempatan bertanding. Gibran dan keluarganya menanggung kontroversi yang terus melekat setelah kemenangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin